



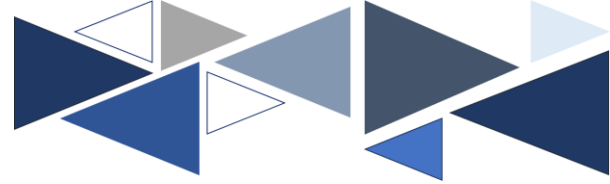
DOKUMEN KAJIAN

KAJIAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023



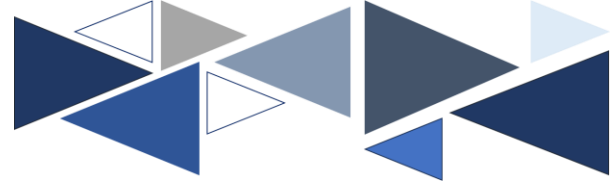
PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN





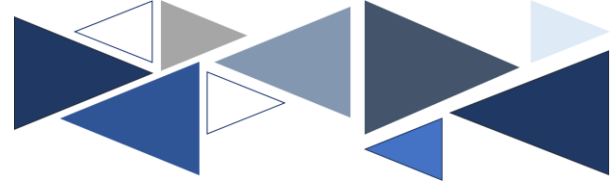
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
1. PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Maksud, Tujuan Dan Sasaran	6
1.3. Dasar Hukum.....	7
2. RUANG LINGKUP WILAYAH	8
2.1. Batas Wilayah dan Administratif	8
2.2. Demografi	11
2.3. Konvergensi Perencanaan Penganggaran Kabupaten Tahun 2023-2026	19
3. PROFIL STUNTING DAERAH.....	21
3.1. Prevalensi Stunting Kotawaringin Barat.....	21
3.2. Kendala dan Permasalahan	23
4. CAPAIAN INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN	31
5. ANALISA SITUASI.....	32
5.1 Analisa Situasi Keluarga Beresiko <i>Stunting</i> , Balita Pendek dan Balita Sangat Pendek	32
5.2 Analisa Situasi Cakupan Layanan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Di Kabupaten Kotawaringin Barat	33
5.3 Analisa Situasi Data P3KE Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	39
5.4 Balita <i>Stunted</i>	48
5.5 Lokus <i>Stunting</i>	50
6. REKOMENDASI	52
7. LAMPIRAN	55
7.1. FGD Laporan Pendahuluan.....	55
7.2. FGD Laporan Antara (Fakta dan Analisa)	56
7.3. FGD Laporan Akhir.....	57



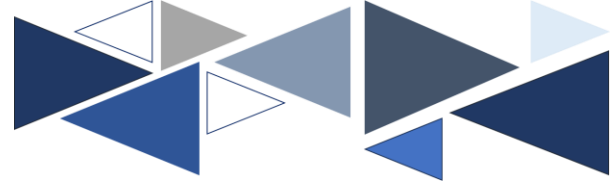
DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	9
Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat	9
Tabel 3 Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022	11
Tabel 4 Indikator Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022	11
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	12
Tabel 6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022	14
Tabel 7 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	14
Tabel 8 Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.....	18
Tabel 9 Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.....	20
Tabel 10 Status Gizi Balita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022	22
Tabel 11 Kendala dan Saran/ Rekomendasi Program Stunting Daerah.....	24
Tabel 12 Indikator Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	31
Tabel 13 Analisa Situasi Keluarga Beresiko Stunting, Balita Pendek dan Balita Sangat Pendek di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	32
Tabel 14 Hasil Analisa Situasi Intervensi Spesifik	36
Tabel 15 Hasil Analisa Situasi Intervensi Sensitif	37
Tabel 16 Jumlah KK Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022	39
Tabel 17 Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Tingkat Pendidikan	43
Tabel 18 Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Pekerjaan.....	43
Tabel 19 Akses Penduduk Miskin Terhadap Sanitasi Layak	44
Tabel 20 Akses Penduduk Miskin Terhadap Air Minum/ Bersih Layak.....	44
Tabel 21 Kepemilikan Tempat Tinggal Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat.....	45
Tabel 22 Kelayakan Tempat Tinggal Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat	45
Tabel 23 Sumber Penerangan yang Digunakan Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat	46
Tabel 24 Keluarga Beresiko Stunting pada Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat	47
Tabel 25 Balita Stunted di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	48
Tabel 26 Jumlah Balita Ukur dan Balita Stunted Berdasarkan Puskesmas dan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Bulan Juli Tahun 2023.....	48
Tabel 27 Lokus Stunting Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	50
Tabel 28 Lokus Stunting Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	51
Tabel 29 Anggaran untuk Penanganan Stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	51
Tabel 30 Rekomendasi Arah Intervensi Spesifik pada Lokus Stunting Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	52
Tabel 31 Rekomendasi Arah Intervensi Spesifik pada Lokus Stunting Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020	6
Gambar 2 Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	8
Gambar 3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 (%).....	12
Gambar 4 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.....	13
Gambar 5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022.....	13
Gambar 6 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022	14
Gambar 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022	17
Gambar 8 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022.....	17
Gambar 9 Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022	18
Gambar 10 Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	19
Gambar 11 Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2018-2021	21
Gambar 12 Prevalensi Gizi Balita di Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	22
Gambar 13 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021	23
Gambar 14 Balita Sangat pendek, Balita Pendek, Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat	33
Gambar 15 Penduduk Miskin Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022....	39
Gambar 16 Penduduk Miskin Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.....	40
Gambar 17 Akses Penduduk Miskin pada Sanitasi Layak.....	40
Gambar 18 Akses Penduduk Miskin pada Air Bersih/ Minum Layak	40
Gambar 19 Kepemilikan Lahan Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	41
Gambar 20 Jenis Dinding, Atap, Lantai, dan Sumber Penerangan pada Tempat Tinggal Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat	41
Gambar 21 Jumlah KK Beresiko Stunting pada Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	42
Gambar 22 Perkembangan Balita Stunted di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	48
Gambar 23 FGD Laporan Pendahuluan	55
Gambar 24 FGD Laporan Antara.....	56
Gambar 25 FGD Laporan Akhir	57



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

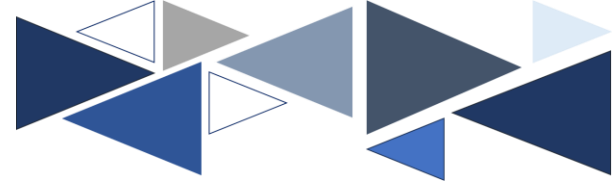
Anak kerdil (*stunting*) merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi tersebut membuat tinggi badan anak tidak sesuai dengan standar untuk anak seusianya, melainkan lebih rendah.

Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya. Selain menghambat tumbuh kembang anak dan rentan terhadap penyakit, *stunting* juga mempengaruhi perkembangan otak yang membuat tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko mengurangi produktivitas pada saat dewasa. *Stunting* dan masalah gizi lainnya diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya (World Bank, 2014).

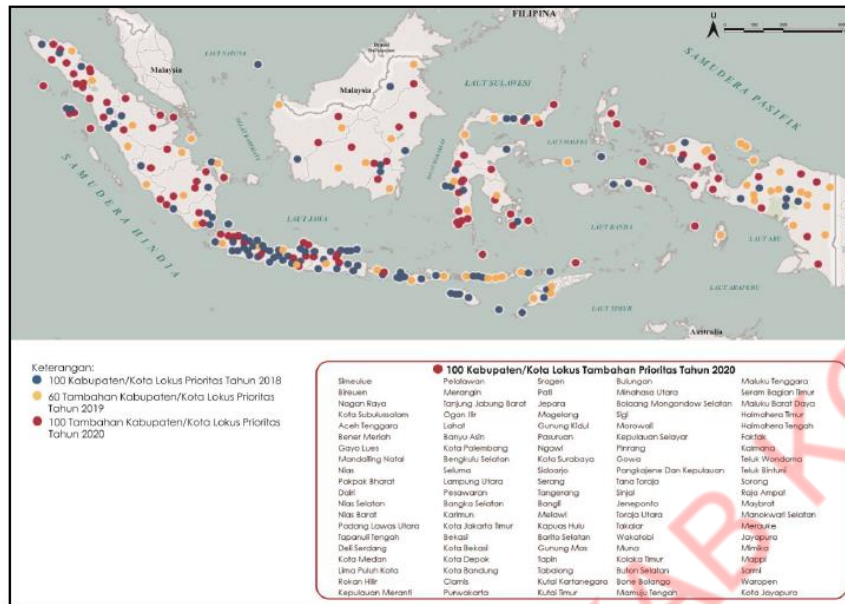
Selain itu, secara global *stunting* berkontribusi sebesar 15-17 persen pada kasus kematian anak. Anak yang *stunting* akan mengalami kesulitan belajar sehingga kurang berprestasi di sekolah dan kurang produktif saat dewasa. *Stunting* dapat menurunkan penghasilan sebanyak 20 persen. Hal ini menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup sehingga terus berada dalam kemiskinan (Cegahstunting.id).

Stunting menjadi masalah dunia karena implikasinya menentukan masa depan bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat prevalensi *stunting* tinggi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 angka prevalensi *stunting* tercatat 8,7 juta (30,8%) pada bayi berumur bawah lima tahun (balita). Menurut SSGBI tahun 2019, prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 27,67%. Angka ini masih jauh dari angka target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), seharusnya angka *stunting* tidak lebih dari 20%. Dijumpai kendala pelaksanaan pencapaian target penurunan *stunting* antara lain karena belum tersedianya strategi komprehensif untuk dijabarkan dalam pelaksanaan program intervensi mendukung pencegahan *stunting*, mulai perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK).

Pada tahun 2018, terdapat 100 Kabupaten/ Kota Lokus Prioritas *stunting*. Pada tahun 2019, terdapat penambahan lokus sebanyak 60 Kabupaten/ Kota. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah tersebut semakin bertambah sebanyak 100 tambahan Kabupaten/ Kota Lokus Prioritas *stunting*.



Penambahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2020



Gambar 1 Lokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2020

Sumber: Surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019

Di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 37 desa/ kelurahan lokus *stunting* pada tahun 2020; 15 desa/ kelurahan lokus *stunting* pada tahun 2021; 12 desa/ kelurahan lokus *stunting* pada tahun 2022; 17 desa/ kelurahan lokus *stunting* pada tahun 2023; dan 10 desa/ kelurahan lokus *stunting* pada tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.

Metode pengambilan data dilakukan oleh Dinas Kesehatan setiap tahunnya (mulai tahun 2019) melalui e-PPGBM, namun semenjak tahun 2021 dilakukan kunjungan langsung ke masyarakat yang memiliki balita untuk dilakukan penimbangan. Sedangkan pada tahun 2022, dilakukan perbaikan dalam metode pengumpulan data agar didapatkan angka yang valid melalui kajian percepatan penurunan *stunting*.

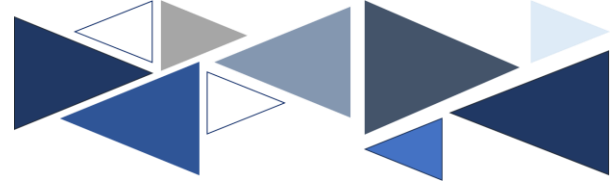
Dalam rangka mewujudkan dokumen rujukan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan tersebut, maka perlu dilakukan **Kajian Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat**. Kajian ini diharapkan dapat membantu program-program daerah yang sudah ada dalam rangka mempercepat penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2. Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Maksud dari kegiatan ini adalah penyusunan serta pemanfaatan dokumen Kajian Percepatan Penurunan *Stunting* agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam menyusun Kajian Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:

1. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses metode pengumpulan data yang mendukung percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukan dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek dalam mempercepat penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat.

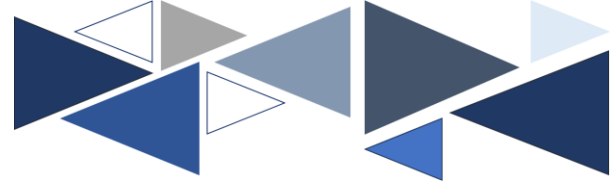


3. Mendorong terwujudnya Kajian Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan kajian ini meliputi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
13. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil/ *Stunting* (TNP2K 2018-2024);
14. Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan *Stunting* di Indonesia (Kementerian Kesehatan 2018);
15. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/ Kota (Kementerian PPN/ Bappenas 2018);
16. Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan *Stunting* (Kementerian Kesehatan 2021); dan
17. Modul Pencegahan dan Penanganan *Stunting* (Kerjasama Kementerian Sosial dan *Tanoto Foundation* 2021).
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Penanggulangan *Stunting* Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Aksi *Ela Hindai Stunting* Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengolahan Air Limbah Domestik;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;

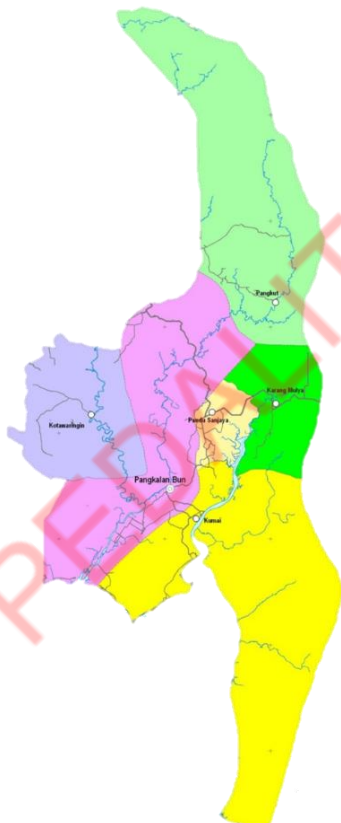


24. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/23/BAPP-IV/2020 Tentang Desa/ Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting*;
25. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 801 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat;
26. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 440 Tahun 2016 Tentang Upaya Percepatan Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan/ *Open Defecation Free* (ODF);
27. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 411 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Desa untuk Penganggaran Pencegahan *Stunting* dalam APDes 2020, Pembentukan Kader Pembangunan Manusia, Pembentukan Rumah Desa Sehat dan Pelaksanaan Rembuk *Stunting*; dan
28. Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021 Tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. RUANG LINGKUP WILAYAH

2.1. Batas Wilayah dan Administratif

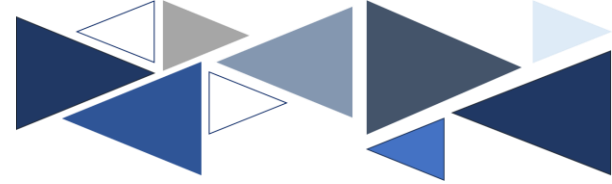
Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah dengan ibukota Pangkalan Bun. Secara geografis, Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara 1°19' – 3°36' Lintang Selatan dan 110°25' – 112°50' Bujur Timur. Kabupaten Kotawaringin Barat juga terletak di antara 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Seruyan. Berikut adalah batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.



Utara	:	Kabupaten Lamandau
Timur	:	Kabupaten Seruyan
Barat	:	Kabupaten Sukamara
Selatan	:	Laut Jawa

Gambar 2 Wilayah Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Revisi RTRW Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022



Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas 10.759 km² atau 7,01% dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan 94 (sembilan puluh empat) desa. Kecamatan Kotawaringin Lama terdiri dari 15 desa dan 2 Kelurahan, Kecamatan Arut Selatan terdiri dari 13 desa dan 7 kelurahan, Kecamatan Kumai terdiri dari 15 desa dan 3 kelurahan, Kecamatan Pangkalan Banteng terdiri dari 17 desa, Kecamatan Pangkalan Lada terdiri dari 11 desa, dan Arut Utara terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Jumlah keseluruhan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 81 desa dan 13 kelurahan. Berikut adalah luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut kecamatan dan desa.

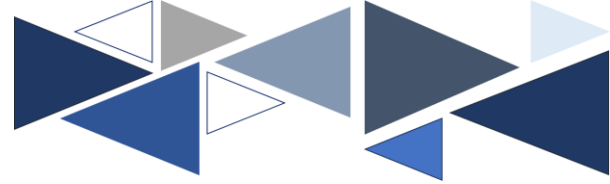
Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	Persentase
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hilir	1.219,83	11,34
2	Arut Selatan	Madurejo	2.342,66	21,77
3	Kumai	Candi	2.915,05	27,09
4	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	1.311,73	12,19
5	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	2.84,73	2,65
6	Arut Utara	Pangkut	2.685	24,96
Kabupaten Kotawaringin Barat		Pangkalan Bun	10.759	100

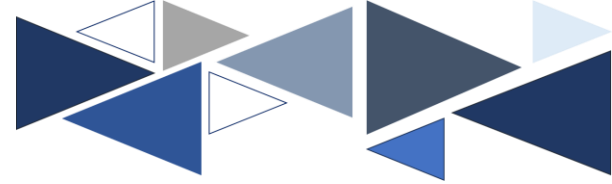
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2 Luas Wilayah Menurut Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas	Persentase
<i>Kotawaringin Lama</i>				
1		Babual Baboti	139,00	1,29
2		Tempayung	53,00	0,49
3		Sakabulin	31,00	0,29
4		Kinjil	43,00	0,40
5		Kotawaringin Hilir	520,00	4,83
6		Riam Durian	23,45	0,22
7		Dawak	41,00	0,38
8		Kotawaringin Hulu	114,00	1,06
9		Lalang	51,00	0,47
10		Rungun	71,00	0,66
11		Kondang	78,00	0,72
12		Sukamulya	7,02	0,07
13		Sukajaya	9,83	0,09
14		Suka Makmur	13,18	0,12
15		Ipuh Bangun Jaya	21,05	0,20
16		Sumber Mukti	3,00	0,03
17		Palih Baru	1,30	0,01
<i>Arut Selatan</i>				
1		Tanjung Putri	19,00	0,18
2		Kumpai Batu Bawah	19,45	0,18
3		Kumpai Batu Atas	30,00	0,28
4		Pasir Panjang	162,00	1,51
5		Mendawai	23,88	0,22
6		Mendawai Seberang	28,00	0,26
7		Raja	0,96	0,01
8		Sidorejo	9,00	0,08
9		Madurejo	26,00	0,24
10		Baru	70,62	0,66
11		Raja Seberang	115,00	1,07
12		Rangda	51,00	0,47
13		Kenambui	320,00	2,97



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas	Persentase
14		Runtu	504,00	4,68
15		Umpang	609,00	5,66
16		Natai Raya	6,20	0,06
17		Medangsari	9,00	0,08
18		Natai Baru	7,30	0,07
19		Tanjung Terantang	12,25	0,11
20		Sulung	320,00	2,97
<i>Kumai</i>				
1		Sungai Cabang	333,00	3,10
2		Teluk Pulai	478,00	4,44
3		Sungai Sekonyer	791,00	7,35
4		Kubu	122,00	1,13
5		Sungai Bakau	111,00	1,03
6		Teluk Bogam	82,00	0,76
7		Keraya	78,00	0,72
8		Sebuai	62,00	0,58
9		Sungai Kapitan	90,00	0,84
10		Kumai Hilir	64,05	0,60
11		Batu Belaman	73,00	0,68
12		Sungai Tendang	52,00	0,48
13		Candi	67,00	0,62
14		Kumai Hulu	30,00	0,28
15		Sungai Bedaun	403,00	3,75
16		Sebuai Timur	35,00	0,33
17		Bumi Harjo	27,62	0,26
18		Pangkalan Satu	16,38	0,15
<i>Pangkalan Banteng</i>				
1		Pangkalan Banteng	846,00	7,86
2		Mulya Jadi	14,00	0,13
3		Amin Jaya	45,00	0,42
4		Natai Kerbau	65,00	0,60
5		Karangmulya	16,73	0,16
6		Marga Mulya	22,00	0,20
7		Arga Mulya	150,00	1,39
8		Kebun Agung	9,50	0,09
9		Sido Mulyo	45,00	0,42
10		Simpang Berambai	7,00	0,07
11		Sungai Hijau	10,00	0,09
12		Sungai Bengkuang	28,00	0,26
13		Sungai Kuning	8,50	0,08
14		Sungai Pakit	14,00	0,13
15		Berambai Makmur	5,00	0,05
16		Karang Sari	14,00	0,13
17		Sungai Pulau	12,00	0,11
<i>Pangkalan Lada</i>				
1		Purbasari	21,00	0,20
2		Sungai Rangit Jaya	31,79	0,30
3		Sumber Agung	32,10	0,30
4		Lada Mandala Jaya	31,73	0,29
5		Makarti Jaya	13,00	0,12
6		Pandu Senjaya	60,75	0,56
7		Pangkalan Tiga	22,50	0,21
8		Kadipi Atas	15,81	0,15
9		Pangkalan Dewa	14,25	0,13
10		Pangkalan Durin	21,00	0,20
11		Sungai Melawen	20,80	0,19



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas	Persentase
<i>Arut Utara</i>				
1		Nanga Mua	444,00	4,13
2		Pangkut	238,00	2,21
3		Sukarami	186,00	1,73
4		Gandis	289,00	2,69
5		Kerabu	181,00	1,68
6		Sambi	166,00	1,54
7		Penyombaan	258,00	2,40
8		Pandau	330,00	3,07
9		Riam	145,00	1,35
10		Penahan	418,00	3,89
11		Sungai Dau	30,00	0,28
Kabupaten Kotawaringin Barat			10.759	100

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel-tabel di atas, kecamatan terluas di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kecamatan Kumai dengan luas 2.915,1 km², disusul oleh Kecamatan Arut Utara seluas 2.685 km² dan Kecamatan Arut Selatan seluas 2.342,7 km². Selain itu, dapat diketahui bahwa kecamatan dengan desa terbanyak adalah Kecamatan Arut Selatan sebanyak 20 (dua puluh) desa/ kelurahan.

2.2. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 mencapai 274.935 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 272.531 jiwa. Kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan sebesar 0,22. Berikut adalah kondisi kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

Tabel 3 Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

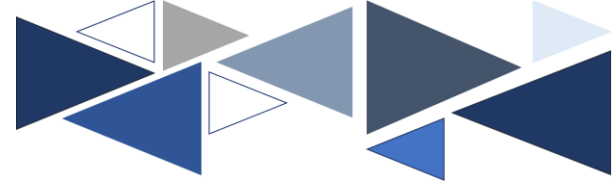
No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Kepadatan Penduduk per Km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Kotawaringin Lama	1.219,83	19.319	7,03	0,54	15,84	112
2	Arut Selatan	2.342,66	119.988	43,64	1,09	51,22	105
3	Kumai	2.915,05	53.054	19,30	0,46	18,20	106
4	Pangkalan Banteng	1.311,73	38.235	13,91	1,32	29,15	113
5	Pangkalan Lada	284,73	34.964	12,72	1,33	122,80	107
6	Arut Utara	2.685	9.375	3,41	0,21	3,49	132
Kabupaten Kotawaringin Barat		10.759	272.531	274.935	100	0,96	25,55

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Kepadatan penduduk di Kotawaringin Barat pada tahun 2022 mencapai 25,55 jiwa/km² sedangkan pada tahun 2021 mencapai 25,33%. Hal itu berarti, setiap km² wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dihuni sekitar 25 sampai 26 jiwa. Berikut adalah kependudukan Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.

Tabel 4 Indikator Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (jiwa)	312.911	321.751	272.531	274.935
Pertumbuhan (%)	2,90	3,11	0,79	0,96
Kepadatan (jiwa/km ²)	29,08	29,91	25,33	25,55



Uraian	2019	2020	2021	2022
Sex Ratio (L/P) (%)	113,00	113,00	108,09	108
% Penduduk Menurut Kelompok Umur				
0-14 Tahun	25,49	25,14	25,73	25,29
15-64 Tahun	71,34	71,58	69,89	70,11
65+ Tahun	3,16	3,29	4,38	4,59

Sumber: Proyeksi Penduduk hasil SP2020; Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020-2023; Proyeksi Penduduk hasil SP2020; Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2020-2023.



Gambar 3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 (%)

Sumber: BPS, 2022, diolah

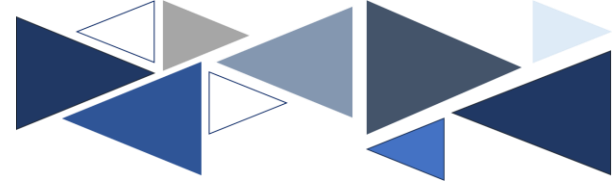
Pertumbuhan penduduk di Kotawaringin Barat mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu 0,79% dimana jumlah penduduk pada tahun 2021 mengalami penurunan. Berkurangnya jumlah penduduk pada tahun 2021 mempengaruhi pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, serta sex ratio.

Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Perbandingan tersebut bisa dilihat dari nilai *Sex Ratio*. Nilai *Sex Ratio* jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 108%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan, terdapat 108 jiwa penduduk laki-laki.

Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2022, sebesar 70,11% dari seluruh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penduduk yang berusia produktif, yaitu berusia 15-64 tahun. Sedangkan 25,29% merupakan penduduk berusia 0-14 tahun, dan sisanya adalah penduduk berusia lebih dari 65 tahun sebesar 4,59%. Berikut adalah komposisi penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2022.

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

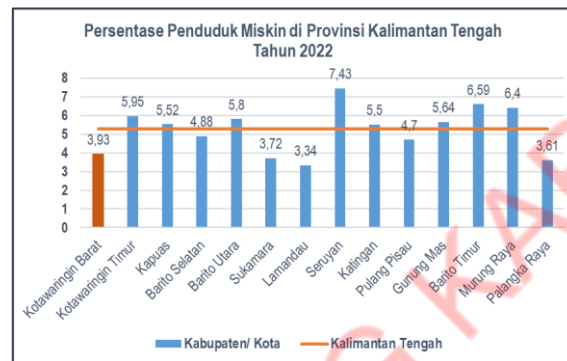
Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	12936	12237	25173
5-9	11600	10785	22385
10-14	11333	10661	21994
15-19	10722	9869	20591
20-24	11675	11194	22869
25-29	11625	11222	22847
30-34	11336	11110	22446
35-39	11692	11558	23250
40-44	11635	10748	22383
45-49	10537	9488	20025
50-54	8828	7524	16352
55-59	6880	6084	12964
60-64	4943	4093	9036



Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
65-69	3310	2677	5987
70-74	2026	1557	3583
75+	1643	1407	3050
Kabupaten Kotawaringin Barat	142721	132214	274935

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023

Jika dilihat dari data BPS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di bawah rata-rata persentase penduduk miskin provinsi atau berada di posisi 11 dari 14 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut adalah persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.



Gambar 4 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022 cukup fluktuatif. Penduduk miskin di Kotawaringin Barat mengalami penurunan pada tahun 2015-2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021. Namun, persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan kembali pada tahun 2022. Berikut adalah jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat.

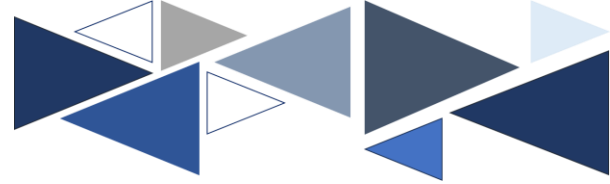


Gambar 5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan sebesar 0,02% pada tahun 2022, dimana pada tahun 2021 mencapai 3,95% dan pada tahun 2022 sebesar 3,93%.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin



Barat meningkat hingga 12,29 ribu jiwa dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 menjadi 12,44 ribu jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
2015	14,01
2016	14,11
2017	13,27
2018	12,9
2019	12,76
2020	11,46
2021	12,29
2022	12,44

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah



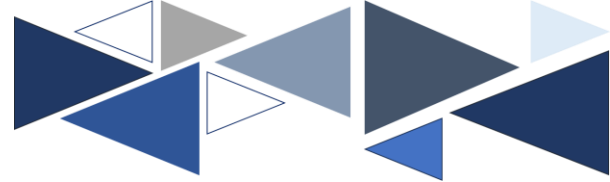
Gambar 6 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

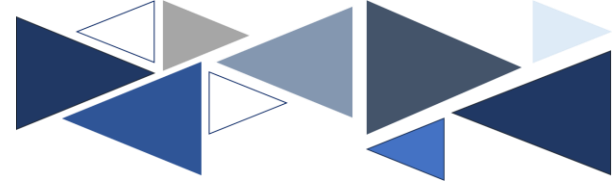
Selain itu, kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat juga dapat dilihat melalui DTKS yang meliputi jumlah penduduk dan KK penerima bantuan. Berikut adalah DTKS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Tabel 7 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Kepmensos RI Nomor 69/HUK/2023 Tanggal 17 April 2023	
			JIWA	KK
1	ARUT SELATAN	1 Tanjung Putri	486	160
		2 Kumpai Batu Bawah	605	278
		3 Kumpai Batu Atas	1,061	442
		4 Pasir Panjang	1,982	762
		5 Mendawai	4,281	1,628
		6 Mendawai Seberang	1,022	356
		7 Raja	1,271	509
		8 Sidorejo	2,297	953
		9 Madurejo	2,837	1,106
		10 Baru	4,963	1,939
		11 Raja Seberang	702	247
		12 Rangda	110	58
		13 Kenambui	173	78
		14 Runtu	333	141
		15 Umpang	377	135
		16 Natai Raya	370	160



NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		Kepmensos RI Nomor 69/HUK/2023 Tanggal 17 April 2023	
				JIWA	KK
		17	Medang Sari	573	213
		18	Natai Baru	369	153
		19	Tanjung Terantang	638	230
		20	Sulung	88	49
		21	<i>Wilayah Kosong (Null)</i>	97	50
TOTAL ARUT SELATAN				24,635	9,647
2	ARUT UTARA	1	Nanga Mua	72	38
		2	Pangkut	425	207
		3	Sukarami	76	31
		4	Gandis	220	81
		5	Kerabu	123	46
		6	Sambi	213	77
		7	Penyombaan	140	53
		8	Pandau	67	26
		9	Riam	88	38
		10	Panahan	162	73
		11	Sungai Dau	49	19
		12	<i>Wilayah Kosong (Null)</i>	25	10
TOTAL ARUT UTARA				1,660	699
3	KOTAWARINGIN LAMA	1	Babual Baboti	130	59
		2	Tempayang	92	55
		3	Sakabulin	53	27
		4	Kinjil	107	61
		5	Kotawaringin Hilir	409	175
		6	Riam Durian	283	134
		7	Dawak	65	32
		8	Kotawaringin Hulu	305	124
		9	Lalang	65	27
		10	Rungun	294	142
		11	Kondang	108	42
		12	Sagu Suka Mulya	87	48
		13	Suka Jaya	179	115
		14	Suka Makmur	161	78
		15	Ipuh Bangun Jaya	268	93
		16	Sumber Mukti	95	54
		17	Palih Baru	224	102
		18	<i>Wilayah Kosong (Null)</i>	26	11
TOTAL KOTAWARINGIN LAMA				2,951	1,379
4	KUMAI	1	Sungai Cabang	631	188
		2	Teluk Pulai	141	53
		3	Sungai Sekonyer	151	53
		4	Kubu	1,626	622
		5	Sungai Bakau	481	168
		6	Teluk Bogam	728	258
		7	Keraya	235	93
		8	Sabuai	362	137
		9	Sungai Kapitan	1,616	597
		10	Kumai Hilir	3,077	1,201
		11	Batu Belaman	1,010	372
		12	Sungai Tendang	921	374
		13	Candi	1,181	458
		14	Kumai Hulu	3,787	1,370
		15	Sungai Bedaun	277	124
		16	Sebuai Timur	96	35



NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		Kepmensos RI Nomor 69/HUK/2023 Tanggal 17 April 2023	
				JIWA	KK
		17	Bumi Harjo	1,599	597
		18	Pangkalan Satu	736	286
		19	Wilayah Kosong (Null)	46	25
TOTAL KUMAI				18,701	7,011
5	PANGKALAN BANTENG	1	Pangkalan Banteng	253	112
		2	Mulya Jadi	276	124
		3	Amin Jaya	718	309
		4	Natai Kerbau	296	136
		5	Karang Mulya	591	244
		6	Marga Mulya	304	108
		7	Arga Mulya	426	171
		8	Kebun Agung	340	134
		9	Sido Mulyo	458	183
		10	Simpang Berambai	234	105
		11	Sungai Hijau	756	231
		12	Sungai Bengkuang	424	179
		13	Sungai Kuning	300	126
		14	Sungai Pakit	369	156
		15	Berambai Makmur	122	55
		16	Karang Sari	231	85
		17	Sungai Pulau	299	114
		18	Wilayah Kosong (Null)	17	10
TOTAL PANGKALAN BANTENG				6,414	2,582
6	PANGKALAN LADA	1	Purbasari	1,061	427
		2	Sungai Rangit Jaya	927	371
		3	Sumber Agung	1,023	433
		4	Lada Mandala Jaya	942	396
		5	Makarti Jaya	298	149
		6	Pandu Sanjaya	1,150	489
		7	Pangkalan Tiga	656	298
		8	Kadipi Atas	381	151
		9	Pangkalan Dewa	637	269
		10	Pangkalan Durin	564	274
		11	Sungai Melawen	620	305
		12	Wilayah Kosong (Null)	42	17
TOTAL PANGKALAN LADA				8,301	3,579
7	Wilayah Kosong (Null)	1	Wilayah Kosong (Null)	17	11
TOTAL NULL				17	11
TOTAL KOTAWARINGIN BARAT				62,679	24,908

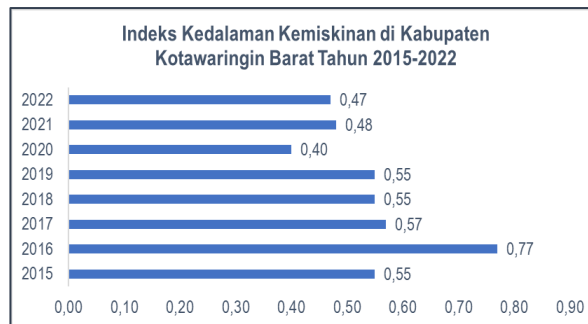
Sumber: DTKS, Kabupaten Kotawaringin 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat 62.679 jiwa dan 24.908 kk yang masih dikategorikan warga yang membutuhkan bantuan dan pemberdayaan sosial, Kecamatan Arut Selatan dengan jumlah warga terbanyak yaitu 24.635 Jiwa dan 9.647, dan masih banyaknya warga miskin yang belum terdaftar DTKS.

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan (GK). Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.



Berikut adalah perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015-2022.

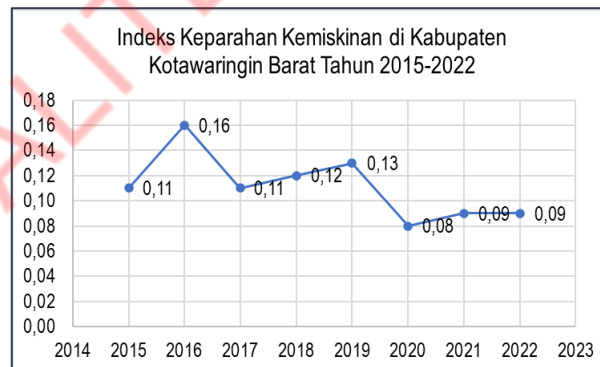


Gambar 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022 cukup variatif. Nilai indeks mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 0,77, lalu menurun drastis pada tahun berikutnya. Pada tahun 2018-2019, nilai indeks stagnan pada angka 0,55. Selanjutnya nilai indeks mengalami penurunan drastis kembali pada tahun 2020 menjadi 0,40. Nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 0,47. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin mendekati garis kemiskinan.

Berdasarkan BPS, Indeks Keparahan Kemiskinan dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai ini berarti bahwa semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berikut adalah Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022.

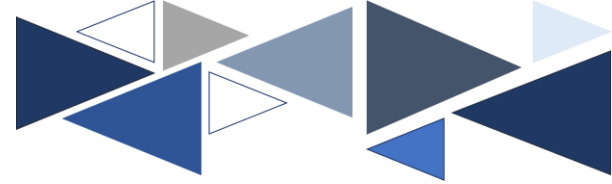


Gambar 8 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa nilai Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2018 nilai indeks menurun hingga 0,08. Selanjutnya, nilai indeks pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga 0,09 dan stagnan pada tahun berikutnya.

Menurut BPS, Garis Kemiskinan (GK) adalah jumlah total dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging,



telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lainnya). Sedangkan, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan (GK) berperan penting dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Garis kemiskinan yang meningkat menunjukkan bahwa harga-harga semakin naik baik dari makanan maupun nonmakanan sehingga untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin namun GK naik harus dilakukan intervensi peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk agar pendapatan yang dimiliki dapat mencukupi bahkan melebihi garis kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, Garis Kemiskinan Nasional pada bulan September tahun 2022 naik sebesar 10,16% dibandingkan bulan September tahun 2021. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Indonesia (perkotaan) mencapai Rp. 502.130,00, sedangkan pada tahun 2022 mencapai Rp. 552.349,00. Garis kemiskinan pedesaan tahun 2021 berada di Rp. 464.474,00 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan hingga Rp. 513.170,00.



Gambar 9 Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022

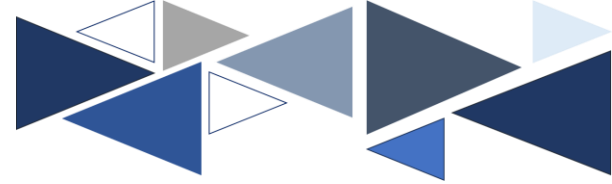
Sumber: BPS Indonesia dan Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data BPS tahun 2018-2022, Garis Kemiskinan di Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami peningkatan. Hal itu menandakan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan di Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat meningkat setiap tahunnya.

Garis Kemiskinan Kotawaringin Barat sendiri mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2021 berada di Rp. 418.388,00 dan pada tahun 2022 meningkat hingga Rp. 476.297,00. Berikut adalah Garis Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 8 Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022

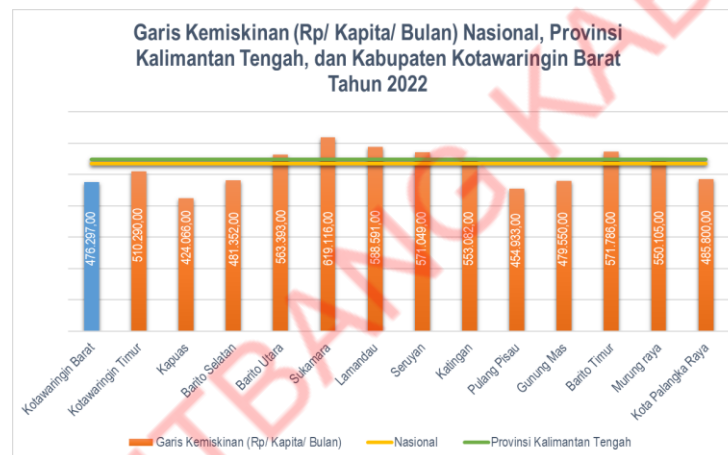
No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan		
		2021	2022	D (selisih)
1	Kotawaringin Barat	418.388,00	476.297,00	57.909,00
2	Kotawaringin Timur	467.551,00	510.290,00	42.739,00
3	Kapuas	345.272,00	424.066,00	78.794,00
4	Barito Selatan	450.706,00	481.352,00	30.646,00
5	Barito Utara	525.236,00	563.393,00	38.157,00
6	Sukamara	568.578,00	619.116,00	50.538,00
7	Lamandau	539.744,00	588.591,00	48.847,00
8	Seruyan	529.892,00	571.049,00	41.157,00
9	Katingan	498.487,00	553.082,00	54.595,00



No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan		
		2021	2022	D (selisih)
10	Pulang Pisau	411.258,00	454.933,00	43.675,00
11	Gunung Mas	456.984,00	479.550,00	22.566,00
12	Barito Timur	534.896,00	571.786,00	36.890,00
13	Murung Raya	519.390,00	550.105,00	30.715,00
14	Palangka Raya	456.276,00	485.800,00	29.524,00
	Kalimantan Tengah	506.982,00	548.816,00	41.834,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data BPS Tahun 2022, Garis Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat berada di bawah Garis Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp. 476.297,00. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini yang merupakan Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.



Gambar 10 Garis Kemiskinan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

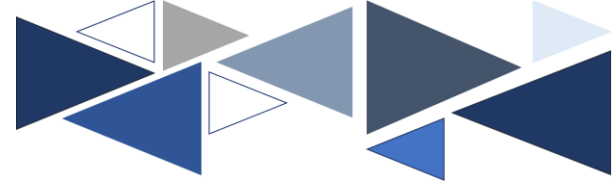
Sumber: BPS Indonesia dan Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023, diolah

2.3. Konvergensi Perencanaan Penganggaran Kabupaten Tahun 2023-2026

Pencegahan *stunting* dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan intervensi yang terpadu untuk menyasar kelompok prioritas di lokasi prioritas merupakan kunci keberhasilan perbaikan gizi, tumbuh kembang anak, dan pencegahan *stunting*.

Berdasarkan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, percepatan penurunan *stunting* berkorelasi dengan peningkatan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas yang berwawasan lingkungan, peningkatan kondusifitas daerah dan pengurangan kemiskinan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut tertuang dalam tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 sebagai berikut.

- ♣ Tujuan II: Meningkatkan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas yang berwawasan lingkungan. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut meliputi:
 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
 2. Menurunnya Resiko Bencana; dan

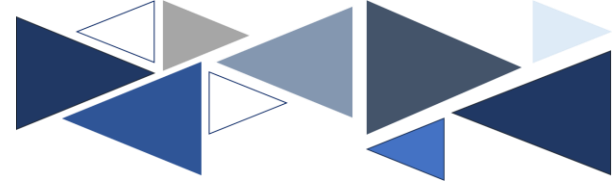


3. Meningkatnya Kualitas Dan Konektivitas Infrastruktur Dasar.

- ♣ Tujuan III: Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman dan demokratis. Sasaran untuk memenuhi tujuan tersebut mencakup:
 1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 2. Menurunnya Tingkat Pengangguran; dan
 3. Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat.
- ♣ Tujuan V: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasaran untuk memenuhi tujuan tersebut adalah sebagai berikut.
 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; dan
 2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

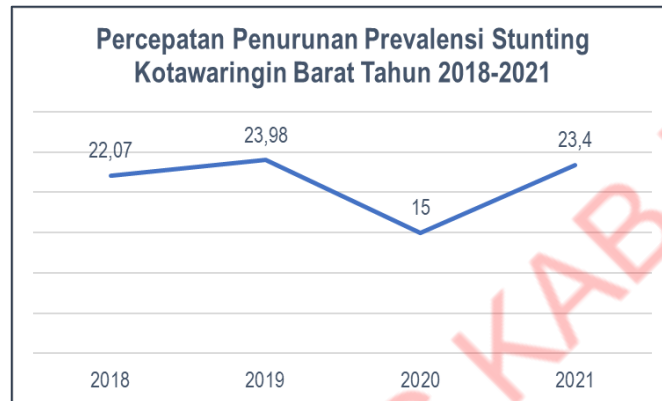
Tabel 9 Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026

Tujuan / Sasaran RPD	Indikator Tujuan / Sasaran RPD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target				Perangkat Daerah
				2023	2024	2025	2026	
TUJUAN II: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEMENUHAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	INDEKS RISIKO BENCANA	SKOR INDEKS	131	121	111	101	91	
	INDEKS INFRASTRUKTUR	SKOR INDEKS	67.84	68,06	68,72	69,6	70,85	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor Indeks	72.12	69.84	70.11	72.12	72.22	Dinas Lingkungan Hidup
Menurunnya resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Skor Indeks	0,386	0,414	443	0,471	0,5	BPBD
Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dasar	Indeks infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	Skor Indeks	70.01	71.45t	72.28	72.80	73.37	Dinas PUPR
	Indeks infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Skor Indeks	68.40	68.74	68.88	69.00	69.17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Indeks infrastruktur Urusan Perhubungan	Skor Indeks	63.00	64.00	65.00	67.00	70.00	Dinas Perhubungan
TUJUAN III: MENINGKATKAN KONDUSIFITAS DAERAH DAN PENGURANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	%	3.95	3.59	3.38	3.17	2.96	
	PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEAMANAN	%	7	9	11	13	15	
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani	%	86.03	86.5	87	87.6	88.2	Dinas Sosial
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.70	4.60	4.50	4.40	4.30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	%	40	45	50	55	60	Satpol PP
	Persentase Penurunan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan	%	100	100	100	100	100	Bakesbangpol
TUJUAN V: MENINGKATKAN KUALITAS SDM	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	SKOR INDEKS	73.07	73.37	73.67	73.97	74.27	
Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.53	8.57	8.61	8.65	8.69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12.73	12.74	12.75	12.76	12.77	
	Angka harapan hidup	Tahun	70,68	70,74	70,82	70,9	70,98	DP3AP2KB



Tujuan / Sasaran RPD	Indikator Tujuan / Sasaran RPD	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target				Perangkat Daerah
				2023	2024	2025	2026	
								Dinas Kesehatan RSUD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor Indeks	91,67	91.80	92.00	92.20	92.40	DP3AP2KB
	Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	DP3AP2KB

Sumber: RPD Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026



Gambar 11 Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Tahun 2018-2021

Sumber: Sumber: Riskesdas, SSGBI, dan e-pggbm tahun 2018-2021, diolah

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa percepatan penurunan prevalensi *stunting* Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik. Walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan capaian penurunan sebesar 15% namun pada tahun 2021 berhasil mengalami peningkatan menjadi sebesar 23,40%. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang konsisten untuk dapat terus meningkatkan angka percepatan penurunan prevalensi *stunting* agar jumlah *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berkurang pula pada setiap tahunnya.

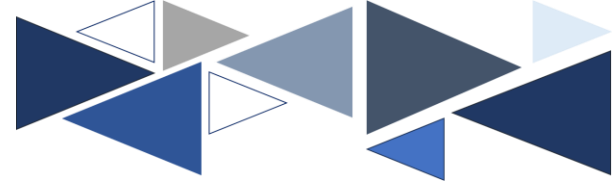
3. PROFIL STUNTING DAERAH

3.1. Prevalensi *Stunting* Kotawaringin Barat

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak *stunting* mempunyai *Intelligence Quotient (IQ)* lebih rendah dibandingkan rata – rata *IQ* anak normal (Kemenkes RI, 2018). *Stunting* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. *Stunting* pada balita dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Retardasi pertumbuhan atau *stunting* pada anak-anak di Indonesia terjadi sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dan penyakit infeksi dan memengaruhi 30% dari anak-anak usia dibawah lima tahun.

Dilihat dari sisi isu, *stunting* menjadi isu penting pembangunan karena tiga hal. Pertama, *stunting* adalah salah satu dari dua isu kesehatan terpopuler di *Google Trends*. Kedua, dari sisi tata kelola, kantor Sekretariat Wakil Presiden memegang komando kolaborasi 23 kementerian/lembaga dalam hal pencegahan *stunting*. Ketiga, solusi *stunting* memerlukan detail kebijakan yang pelik dan tidak instan (Meilissa, 2019).

Tingkat Prevalensi *Stunting* Provinsi Kalimantan Tengah masih termasuk 10 (sepuluh) tertinggi di Indonesia. Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka pencapaian penurunan *Stunting* yang merupakan salah satu

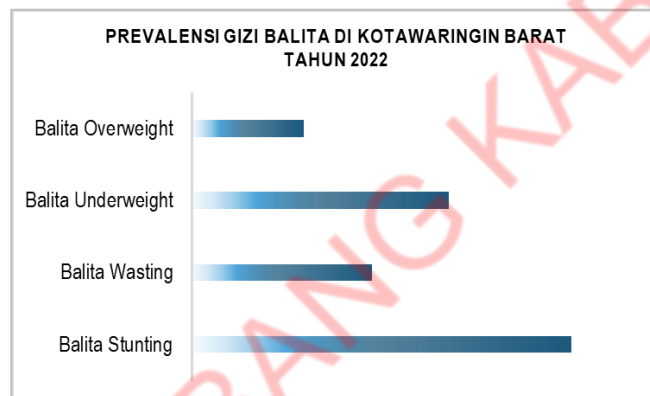


Prioritas Nasional, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Penilaian Kinerja 5 (lima) Kabupaten/Kota Locus *Stunting* di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kementerian Kesehatan menetapkan 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lokus prioritas untuk tahun 2021, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, **Kabupaten Kotawaringin Barat**, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, sehingga diharapkan kepada Kabupaten/Kota lokus baru untuk wajib memprioritaskan program dan anggaran penurunan *Stunting*. Dan pada tahun 2022 seluruh 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi Locus *Stunting*.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada subbab-subbab sebelumnya bahwa angka prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat menempati posisi kesebelas yaitu sebesar 21,1%. Angka ini masih belum memenuhi standar yang ditetapkan WHO yaitu berada di bawah 20%.

Berdasarkan Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2022, status gizi balita dapat dinilai berdasarkan Tinggi Badan dan Berat Badan menurut umur. Berikut adalah prevalensi balita kekurangan gizi di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.



Gambar 12 Prevalensi Gizi Balita di Kotawaringin Barat Tahun 2022

Sumber: Buku Saku Hasil SSGI Tahun 2022

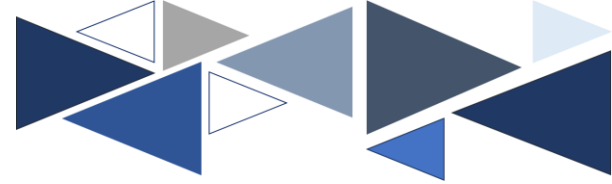
Tabel 10 Status Gizi Balita Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Status Gizi Balita	Prevalensi (%)
<i>Stunting</i>	21,1
<i>Wasting</i>	10
<i>Underweight</i>	14,3
<i>Overweight</i>	6,2

Sumber: Buku Saku Hasil SSGI Tahun 2022

Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita (0-5 tahun) merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan gizi. Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi pada perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa (Dinas Kesehatan, 2019).

Berdasarkan data Kemenkes tersebut, diketahui bahwa balita *stunting* (kurang gizi) di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 21,1% dimana Kabupaten Kotawaringin Barat menempati posisi kesebelas di



Provinsi Kalimantan Tengah. Balita *wasting* (berat badan menurun) menempati posisi keenam dari 14 (empat belas) Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan prevalensi sebesar 10%.

Selain itu juga diketahui bahwa masih terdapat balita yang *overweight* (kelebihan berat badan) dan *underweight* (berat badan kurang). Balita *overweight* di Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 6,2% dan balita *underweight* mencapai 14,3%. Data-data tersebut juga dilengkapi oleh prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2021. Berikut adalah grafik prevalensi tersebut.



Gambar 13 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2021

Sumber: RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026, diolah

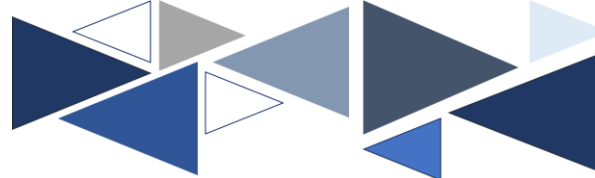
Diketahui bahwa prevalensi balita gizi buruk di Kotawaringin Barat mengalami peningkatan secara bertahap pada tahun 2017-2019 dan mengalami kenaikan tajam pada tahun 2020 hingga mencapai 2,27%. Kemudian prevalensi tersebut menurun drastis pada tahun 2021 yaitu 0,76%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menurunkan angka *stunting* telah dilaksanakan dengan baik. Usaha tersebut tetap dilakukan pada tahun-tahun berikutnya untuk mengurangi angka *stunting* balita di daerah.

3.2. Kendala dan Permasalahan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, ada beberapa kendala penyelenggaraan percepatan pencegahan *Stunting* antara lain:

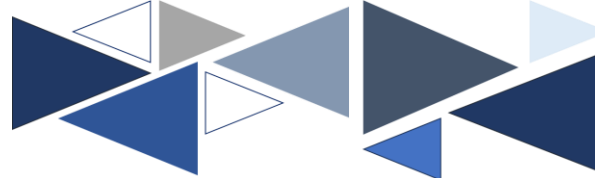
- Belum efektifnya program-program pencegahan *stunting*.
- Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi.
- Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana.
- Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program.
- Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait *stunting*, dan berbagai upaya lainnya.

Berdasarkan kuisioner yang disebarakan ke beberapa OPD terkait *stunting*, dapat diketahui beberapa kendala dalam pelaksanaan program-program upaya penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat, berikut adalah beberapa kendala yang dialami OPD-OPD dalam pelaksanaan program *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat.

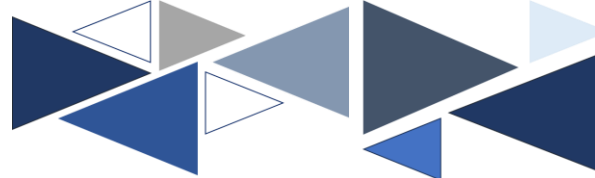


Tabel 11 Kendala dan Saran/ Rekomendasi Program *Stunting* Daerah

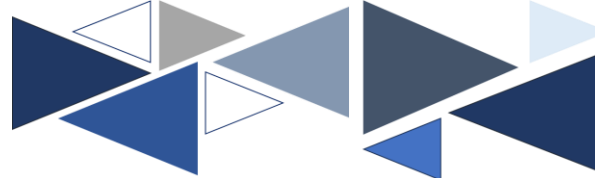
Kegiatan Terkait Penurunan Stunting	Program yang Sudah Dilaksanakan	Kendala Pelaksanaan Program	Hasil Yang Dicapai	Perbaikan/ Saran Program	Rekomendasi yang Ditawarkan
Sosialisasi gemar makan ikan (GEMARIKAN) dalam rangka Hari Ikan Nasional (HARKANNAS).	Lomba masak berbahan dasar ikan yang akan dilaksanakan pada bulan November bertepatan dengan hari Ikan Nasional.	Secara teknis tidak ada kendala, kegiatan dilaksanakan setiap tahun. Hanya saja anggaran yang minim dalam pelaksanaan sosialisasi GEMARIKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Menu masakan ikan untuk kesehatan masyarakat untuk mencegah stunting dan kesehatan anak. - Perubahan perilaku konsumsi masyarakat agar mengonsumsi sumber makanan yang memiliki nilai gizi dan protein hewani yang bersumber dari ikan 	Perlu Intervensi anggaran untuk kegiatan dimaksud agar kegiatan yang dilaksanakan selain sosialisasi juga pemberian kudapan berbahan dasar ikan pada anak sekolah TK/SD	Peningkatan program/ kegiatan capaian kegiatan yang ada terkait stunting dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud
Sosialisasi konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya pangan lokal.	Sosialisasi makanan B2SA ibu ibu PKK dan KWT.	Tidak ada kendala.	Memahami bagaimana porsi makanan yang bergizi seimbang.	Perlu Intervensi anggaran untuk kegiatan dimaksud.	
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Bagi bibit sayuran gratis kepada masyarakat	Transportasi yang jauh dari kota	Masyarakat dapat menanam bibit tersebut di pekarangan dan juga di kebun mereka untuk peningkatan gizi dan nutrisi	Pada tahun 2023 program ini telah dialihkan ke Dinas Pertanian (TPHP)	Kegiatan pengembangan desa B2SA di setiap Desa/ Kelurahan apabila tersedia anggaran
Kawasan Mandiri Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Modal Kelompok - Pelatihan Penguatan Kapasitas Kelompok 	Lambatnya pengguliran dana oleh kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya dana bantuan - Meningkatnya pengetahuan/ keterampilan bagi kelompok yang telah dilatih 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan penguatan modal bagi kelompok yang aktif - Pelatihan keterampilan pemanfaatan potensi lokal - Pelatihan manajemen perbankan 	Pembentukan kelompok desa mandiri pangan
PUPM	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan modal untuk kegiatan penggilingan dan operasional GAPOKTAN dan TTI - Penguatan Modal Peralatan GAPOKTAN 	Ketersediaan gabah yang terbatas dari petani	Operasional GAPOKTAN berupa penggilingan dan distribusi barang dapat berjalan dengan baik	Penguatan modal bagi GAPOKTAN dan TTI	Peningkatan kegiatan penggilingan dan distribusi beras TTI
Peningkatan akses pangan bergizi	Akses kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Terbentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT) penerima P2L	Terbentuknya kelompok wanita tani (KWT) penerima P2L Tahun 2020 sebanyak 6 kelompok, tahun 2021 sebanyak 23	Pada tahun 2023 program ini telah dialihkan ke Dinas Pertanian (TPHP)	Kegiatan pengembangan Desa B2SA di setiap Desa/ Kelurahan apabila tersedia



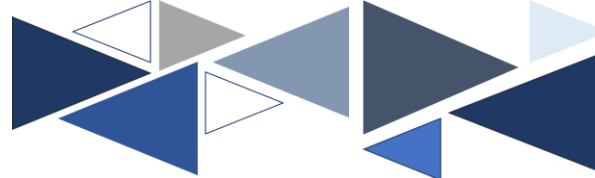
Kegiatan Terkait Penurunan Stunting	Program yang Sudah Dilaksanakan	Kendala Pelaksanaan Program	Hasil Yang Dicapai	Perbaikan/ Saran Program	Rekomendasi yang Ditawarkan
			kelompok dan Tahun 2022 sebanyak 24 kelompok		anggaran
Mini lokakarya tingkat kecamatan.	Sudah terlaksanakan sebanyak 3x kegiatan.	Masih kurang pemahaman TPK dalam input data.	Pembahasan wilayah lokasi adanya data terbaru stunting.	Adanya pembinaan spesifik pada TPK.	
Pendampingan posyandu tingkat kecamatan.	Terlaksana.	Adanya posyandu yang masih menumpang di teras warga.	Terpantaunya tumbuh kembang anak dan ibu hamil.	Adanya dana untuk makanan tambahan pada posyandu sehingga merangsang anak/ibu untuk ke posyandu.	
Pemberian vitamin dan makanan tambahan untuk posyandu oleh desa.	Sudah terlaksana oleh desa di wilayah Kecamatan Kumai.		Membantu masyarakat yang memang memerlukan.		
Kunjungan dan koordinasi pada desa dan puskesmas terhadap kasus stunting.	Kunjungan stunting.	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi bersama puskesmas berjalan baik.- Adanya keluarga yang malu jika anak dikatakan stunting.	Memahami kondisi keluarga stunting.		
Sosialisasi pemberian makanan tambahan pada bunda paud.	Sosialisasi olahan makanan/ sanitasi air.		Bunda paud mengerti terkait gizi dan makanan tambahan yang bervariasi.		
ODF.	Dari 5 desa tinggal 3 desa ODF 2 desa ODF tahun 2022.	Banyaknya rumah yang masih dibantaran sungai.	Adanya bantuan dalam pemberantasan ODF		
Koordinasi perencanaan pelaksanaan untuk pencegahan stunting pada wilayah Kecamatan Arut.	Koordinasi dengan lurah dan kades.	Masih banyak kepala desa yang tidak konsisten dalam penanganan stunting di wilayahnya.	Kurang optimal.	Pada sosialisasi dengan seluruh pejabat lurah dan kepala desa.	Rapat koordinasi.
Masing masing desa adu anggaran untuk program kegiatan penurunan stunting.	<ul style="list-style-type: none">- Pemberian susu- Pemberian bubur untuk anak di posyandu.				
Sebagian kelurahan	Sosialisasi.				



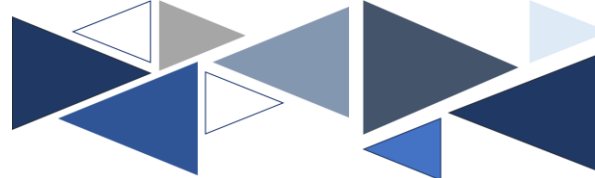
Kegiatan Terkait Penurunan Stunting	Program yang Sudah Dilaksanakan	Kendala Pelaksanaan Program	Hasil Yang Dicapai	Perbaikan/ Saran Program	Rekomendasi yang Ditawarkan
menganggarkan kegiatan untuk mencegah stunting.					
Sosialisasi program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Pengelolaan persampahan program sekolah Adiwiyata.	Sinergitas antar instansi dalam pelaksanaan program pendukung pencegahan stunting.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas sehingga penularan penyakit dan penyebaran infeksi pada ibu hamil dan bayi/anak.	Pelibatan seluruh stakeholder agar program tepat sasaran.	Meningkatkan koordinasi kepada para pemangku.
Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Pengelolaan limbah Domestik.	Penyadartahuan masyarakat terhadap limbah Domestik.		Perlu sinergitas antara pemangku keputusan dalam pengelolaan limbah Domesti.	Kepentingan guna pelaksanaan program program agar efektif.
Mengkawal pelaksanaan TPPS kabupaten.	Bersama dengan kepala DP3AP2KB dan dibawah arahan kaper BKKBN Kalteng melaksanakan fungsi konsultasi kegiatan TPK.	Belum semua TPK menginput hasil pendampingan di Elsimil.	Setiap desa/kelurahan memiliki TPK dan ber – SK.	Monev di tingkat TPPS desa/kelurahan hingga kecamatan.	Menggerakkan TPPS tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
	Membantu kepala DP3AP2KB dan PKB dalam melakukan koordinasi dan menyelenggarakan program dengan TPPS di tingkat kabupaten.	Kegiatan Minilok stunting di tingkat kecamatan belum rutin berjalan tiap bulan.	Rapat TPPS kabupaten sudah terlaksanakan.	Monev capaian minilok dan rapat koordinasi TPPS.	Koordinasi dan fasilitas rutin dengan skretariat TPPS kabupaten.
Kewirausahaan.	Pelatihan kewirausahaan.	Susahnya menumbuhkan semangat dan minat untuk wirausaha.	Tumbuhnya wirausaha baru/pemula.	Selain pelatihan dibutuhkan adanya pendampingan usaha.	Lebih ditingkatkan lagi kolaborasi lintas OPD.
Pengembangan usaha Mitro.	Fasilitas usaha Mikro dalam pengembangan produksi, SDM, pemasaran desain dan teknologi.	Fasilitas sering salah sasaran.	Peningkatan omset usaha.	Lebih selektif bagi penerima fasilitas.	- Kolaborasi lintas OPD - Inovasi teknologi
Pencatatan sipil (akta kelahiran KIA).	- Jemput bola - Kerjasama layanan	- Fasilitas kurang memadai	TH 2022 8.072 berkas	Terpenuhinya anggaran SDM dan sarana prasarana	- Peralatan dan perlengkapan di



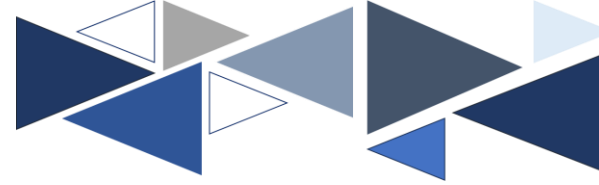
Kegiatan Terkait Penurunan Stunting	Program yang Sudah Dilaksanakan	Kendala Pelaksanaan Program	Hasil Yang Dicapai	Perbaikan/ Saran Program	Rekomendasi yang Ditawarkan
	dengan desa dan klinik bersalin.	- Biaya oprasional - SDM perlu ditambah.		dalam rangka pelayanan administrasi.	akomodir. - Biaya operasional petugas dalam pelaksanaan jemput bola di akomodir. - Penambahan ASN untuk pelayanan akomodir di lapangan.
Pembinaan kader pembangunan manusia (KPM) bersama DPNID dari 2019 sampai dengan sekarang.	Pembinaan - KPM - IST - OJT	Kader yang berganti di tengah tahun berjalan.	Terpetakan dan dilaporkan kondisi 5 cakupan layanan.	Komitmen kader dan desa untuk tetap bersinergi.	Pelatihan kader KPM tidak hanya dari DPMD, bisa dilakukan lintas sektor.
FAD dalam rumah desa sehat (RDS) untuk pemetaan masalah stunting.	Pembentukan dan pembinaan rumah desa sehat (RDS).	- Tidak semua desa membentuk - Desa bingung banyaknya SK yang diminta dari DPD lain dengan bentuk serupa	Terpetakan masalah dan penyebab kasus stunting.	Sinergi antar OPD dan lini lapangan.	
Fasilitas perencanaan desa dalam rembuk stunting desa	Pelaksanaan rembuk stunting sebelum MUKDES RKPDES.	Tidak semua desa melaksanakan.	Perencanaan desa yang tepat sesuai kebutuhan desa.	Sinergi antar OPD dan desa dalam pelaksanaan.	
Fasilitas MUKDES RKPDES dan perencanaan anggaran dalam APBDES.	Fasilitas bersama kecamatan dalam penyusunan APBDES.	Desa belum memahami kegiatan apa yang tepat untuk intervensi di desanya.	Teranggarkan intervensi stunting dalam APBDES.	Sinergi antar OPD dan kecamatan juga desa.	
SE dan PERBUP peran desa dalam penurunan stunting.	PERBUDP. NO.20 TAHUN 2020.		Pedoman penganggaran di APBDES.		
Pelatihan kader posyandu dan kader KPM.	Pelatihan setiap tahun untuk kader posyandu dan kader KPM.	Minimnya anggaran.			
Fasilitas perencanaan desa (APBDES).	Klonsiyering desa dalam penyusunan APBDES.	SDM desa yang masih kurang.			



Kegiatan Terkait Penurunan Stunting	Program yang Sudah Dilaksanakan	Kendala Pelaksanaan Program	Hasil Yang Dicapai	Perbaikan/ Saran Program	Rekomendasi yang Ditawarkan
Sosialisasi peran pemdes dalam intervensi stunting.	Sosialisasi saat konsiyeling penyusunan APBDES.	SDM desa yang masih kurang.			
Jemput bola terhadap anak yang tak hadir di posyandu.			Tingkat kehadiran naik	Pemberian pengertian yang pentingnya ke posyandu.	
Program kecamatan: pemberian makanan bergizi selama 90 hari bekerjasama dengan kader.	Rencana mulai bulan Agustus 23			Ada kontrak kerja dengan kader.	
Pendampingan sampai tindakan ke rumah sakit.		Pasien kadang tidak mau (perlu pemberian pengertian).	Ada perkembangan terhadap anak.		
Konseling dan pemantauan gizi dengan ahli gizi puskesmas + bantuan susu air desa.			Perkembangan baik.		
Posyandu balita (0 – 59) bulan + sweeping.	Gizi.	Tingkat kehadiran sasaran posyandu masih kurang.	Data BB dan TB bayi/balita.	Membuat inovasi kegiatan posyandu.	Pemberian reward/penghargaan untuk anak bayi/balita yang hadir minimal 8x posyandu.
Pengambilan sample air depo air minum.	Kesehatan lingkungan.	Hasil pemeriksaan sample air tidak ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan pemilik depo air.	Ada depo air yang mengandung e-coli.	Selain pemeriksaan sampel juga ada reward dan sanksi pada depo.	Hasil pemeriksaan yang tidak sehat, depo harus melaksanakan rekomendasi dari dinas terkait.
Kelas ibu hamil dan imunisasi tt.	Gizi.	Ada bumil yang beresiko dan tidak ikut kelas ibu hamil.	Data ibu hamil normal dan beresiko.	Sosialisasi kelas bumil dan kunjungan rumah.	Pemberian PMT ibu hamil.
Pemberian PMT balita dan kasus gizi.	Gizi.	PMT terkendala minimnya anggaran.	PMT kurang memenuhi kebutuhan fasilitas.	Peningkatan PMT, pendampingan dan pengawasan pemberian PMT khususnya untuk kasus gizi.	Pemahaman anggaran untuk PMT. Kolaborasi puskesmas dengan kader posyandu dan desa/kelurahan.

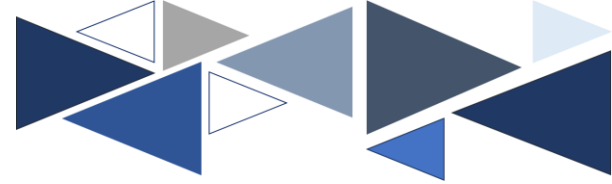


Kegiatan Terkait Penurunan Stunting	Program yang Sudah Dilaksanakan	Kendala Pelaksanaan Program	Hasil Yang Dicapai	Perbaikan/ Saran Program	Rekomendasi yang Ditawarkan
Rembuk stunting desa.	Perencanaan kegiatan.	Hasil rembuk yang diajukan pada musdes tidak semuanya terakomodir.	Prioritas kegiatan	Saat musdes, hasil rembuk stunting dimasukkan dalam kegiatan prioritas.	Prioritas hasil rembuk stunting sebagai bahan prioritas musdes.
<i>Family Development Sesion</i> (FDS) pada PKH	Penyaluran bantuan PKH: Tahap 1 (Januari-Maret), Tahap 2 (April-Juni), Tahap 3 (Juli-September). Tahap 4 (Oktober-Desember)	Penyaluran bantuan PKH Melalui ATM Mandiri, Agen dengan menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), kendalanya: - KPM tidak bisa menggunakan KKS - KKS yang terblokir karena salah PIN; KKS rusak - Bagi KPM yang berdomisili di wilayah geografis yang sulit dan tidak ada sinyal	Pendamping PKH memberikan informasi, edukasi dan melakukan pendampingan kepada KPM PKH, hasilnya: - KPM dapat memahami setelah Pendamping PKH memberikan informasi dan edukasi tentang penggunaan KKS dan pemanfaat bantuan PKH - KPM dapat mengerti tentang KKS yang terblokir, KKS rusak dan mengerti solusinya setelah pendamping PKH mendampingi ke bank Mandiri dan memberikan edukasi. - Koordinasi dengan pihak desa, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), selanjutnya KPM bertemu dengan pendamping PKH dititik tertentu, kemudian melakukan penyaluran bantuan PKH ke ATM/ Agen terdekat	- Mengedukasi kepada salah satu keluarga KPM, agar dapat membantu tata cara penggunaan kks di mesin ATM, Agen, solusi KKS terblokir, KKS rusak. Misalnya: pendamping PKH meng-edukasi kepada salah satu anggota keluarag (anak yg sudah dewasa). - Sarana menghadirkan sinyal HP di wilayah geografis sulit	
	Pertemuan Kelompok/P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dilaksanakan setiap bulan oleh pendamping PKH kepada kelompok dampingan PKH atau KPM	Tidak hadir dalam pertemuan kelompok, karena: - KPM tidak memiliki kendaraan dan tidak ada yang mengantar - KPM sedang bekerja dan tidak dapat dihubungi	Pembentukan Kelompok berdasarkan tempat tinggal terdekat dan jadwal pertemuan kelompok disesuaikan dengan kondisi KPM, berdasarkan kesepakatan dengan KPM. agar KPM dapat hadir dipertemuan kelompok tersebut. Misalnya pertemuan kelompok pada sore hari	Kurangnya Media untuk pertemuan yaitu <i>sound</i> (pengeras suara), proyektor. Agar dapat menampilkan gambar dan penyampaian lebih efektif	DINSOS
KPM yang mendapatkan bantuan soisal pangan	Program Sembako Kemensos/ BPNT	Terdapat KPM yang mengalami saldo 0	Terpenuhinya sebagian kebutuhan dasar pangan KPM	Perlunya tambahan pemenuhan nutrisi plus	Pemenuhan tambahan nutrisi plus kepada KPM



Kegiatan Terkait Penurunan Stunting	Program yang Sudah Dilaksanakan	Kendala Pelaksanaan Program	Hasil Yang Dicapai	Perbaikan/ Saran Program	Rekomendasi yang Ditawarkan
	(Bantuan Pangan Non Tunai)	(tidak masuk dana bansos ke rekening bantuan)		kepada KPM (ibu hamil/ balita)	(ibu hamil/ balita) yang bersumber dari dana APBD

Sumber: Hasil Kuisisioner, 2023, diolah

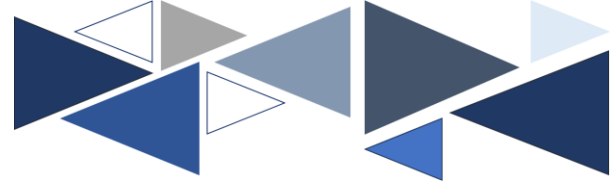


4. CAPAIAN INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN

Terdapat 29 (dua puluh sembilan) Indikator yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Percepatan Penurunan *Stunting*. Indikator percepatan penurunan angka *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Perpres No.72 Tahun 2021 meliputi sebagai berikut:

Tabel 12 Indikator Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	INDIKATOR SASARAN SPESIFIK	NO	INDIKATOR SASARAN SENSITIF
1	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	1	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)
2	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	2	Calon pasangan usia subur (PUS) yg memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah
3	Bumil Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	3	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah
4	Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	4	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i>
5	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	5	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat
6	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	6	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai
7	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
8	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	8	Persentase <i>Unmet Need</i> pelayanan keluarga berencana
9	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	9	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan
10	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	10	Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
		11	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
		12	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri
		13	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan
		14	Cakupan keluarga berisiko <i>stunting</i> yang memperoleh pendampingan
		15	Keluarga berisiko <i>stunting</i> yg mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi
		16	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak
		17	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak
		18	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan
		19	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur



Sumber: Bappeda, 2023

Terdapat 29 Indikator (10 indikator spesifik dan 19 indikator sensitif) yang digunakan Pemda Kab. Kotawaringin Barat sebagai sasaran intervensi dalam Percepatan Penurunan *Stunting*. Ada beberapa indikator yang merupakan indikator tambahan selain indikator yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, yang bertujuan untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat. Indikator spesifik tersebut adalah Calon Pengantin/ Calon Ibu yang Menerima Tablet Tambah Darah (TTD). Sedangkan indikator sensitif yang dimaksud meliputi 8 (delapan) indikator, yaitu:

1. Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
3. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*;
4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai;
5. Persentase *Unmet Need* pelayanan keluarga berencana;
6. Keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
7. Keluarga berisiko *stunting* yg mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi; dan
8. Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan.

Capaian indikator cakupan layanan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab selanjutnya.

5. ANALISA SITUASI

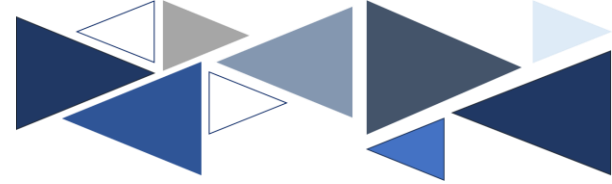
5.1 Analisa Situasi Keluarga Berisiko *Stunting*, Balita Pendek dan Balita Sangat Pendek

Berdasarkan hasil Analisa Situasi, jumlah keluarga berisiko *stunting* tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kecamatan Arut Selatan dengan 18.507 keluarga atau 35,75% dari total keluarga di kecamatan dan Kecamatan Kumai dengan 10.139 keluarga atau 38,71% dari total keluarga di kecamatan. Selain itu, Jumlah keluarga balita pendek dan balita sangat pendek tertinggi berada di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Berikut adalah hasil Analisa Situasi Keluarga Berisiko *Stunting*, Balita Pendek dan Balita Sangat Pendek di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 13 Analisa Situasi Keluarga Berisiko *Stunting*, Balita Pendek dan Balita Sangat Pendek di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah_Keluarga_Beresiko_Stunting	Jumlah_Balita	Jumlah_Balita_Sangat_Pendek	Jumlah_Balita_Pendek
1	Kotawaringin Lama	6.634	124	1.658	6	20
2	Arut Selatan	37.905	810	6.552	44	129
3	Kumai	16.996	1.000	3.275	33	113
4	Pangkalan Banteng	12.096	556	1.974	35	187
5	Pangkalan Lada	12.065	437	2.266	28	50
6	Arut Utara	2.989	281	757	35	60
	Jumlah	88.685	3.208	16.482	181	559

Sumber: Bappeda, 2023, diolah



Gambar 14 Balita Sangat pendek, Balita Pendek, Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: Bappeda, 2023, diolah

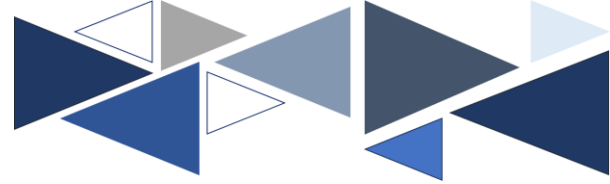
Dapat diketahui bahwa jumlah balita sangat pendek, balita pendek, dan keluarga beresiko *stunting* tinggi terdapat di Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Banteng. Jumlah keluarga beresiko *stunting* yang terdata mencakup 3,62% dari jumlah keluarga terdata di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari jumlah balita yang terdata sebanyak 16.482 balita, diantaranya terdata 1,10% jumlah balita sangat pendek dan 3,39% jumlah balita pendek.

5.2 Analisa Situasi Cakupan Layanan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Analisa situasi cakupan layanan ini dilakukan berdasarkan data PK-21 yang telah diklasifikasikan oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, serta sesuai dengan 29 (dua puluh sembilan) Capaian Indikator Cakupan Layanan untuk Analisa Situasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Berdasarkan hasil Analisa Situasi, berikut adalah hasil yang didapat:

A. INTERVENSI SPESIFIK

1. Cakupan Layanan Catin/ Calon Ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) tertinggi di Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar 64,35% dan Kecamatan Arut Selatan sebesar 52,20%. Kecamatan-kecamatan lainnya belum tercatat adanya data capaian layanan.
2. Cakupan Layanan Remaja Putri yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sudah terpenuhi seluruhnya (layanan 100%) di kecamatan.
3. Cakupan Layanan Bumil (Ibu hamil) Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi telah terpenuhi di Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada,

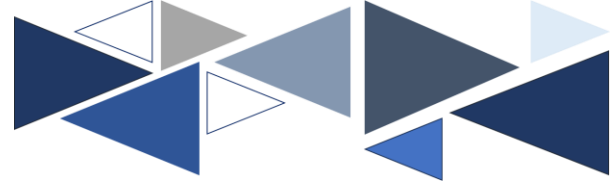


dan Kecamatan Arut Utara. Sedangkan Kecamatan Arut Selatan baru terenuhi sekitar 85% dan Kecamatan Kotawaringin Lama terpenuhi sebesar 70,59%.

4. Cakupan Layanan Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan tertinggi yaitu di Kecamatan Arut Utara sebesar 90,76%. Kecamatan yang belum memenuhi target nasional (80%) adalah Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu 72,87%.
5. Cakupan Layanan Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif tertinggi yaitu di Kecamatan Pangkalan Lada sebesar 78,31%. Target Nasional sebesar 80% belum terpenuhi di seluruh kecamatan.
6. Cakupan Layanan Anak usia 6-23 Bulan Yang Mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) telah terpenuhi (layanan 100%) di seluruh kecamatan.
7. Cakupan Layanan Anak berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) Gizi Buruk Yang Mendapat Pelayanan Tata Laksana Gizi Buruk telah terpenuhi (layanan 100%) di Kecamatan Arut Utara. Sedangkan kecamatan lainnya belum memenuhi target nasional (90%).
8. Cakupan Layanan Anak Berusia Di Bawah Lima Tahun (Balita) Yang Dipantau Pertumbuhan Dan Perkembangannya tertinggi berada di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu 81,59%. Meskipun begitu, semua kecamatan belum memenuhi target nasional sebesar 90%.
9. Cakupan Layanan Anak Berusia Di Bawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang Yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi telah terpenuhi (layanan 100%) di 5 (lima) kecamatan kecuali di Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar 70,59%.
10. Capaian Layanan Balita Yang Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap tertinggi di Kecamatan Kumai sebesar 99,26%. Seluruh kecamatan di Kotawaringin Barat telah memenuhi target nasional (90%).

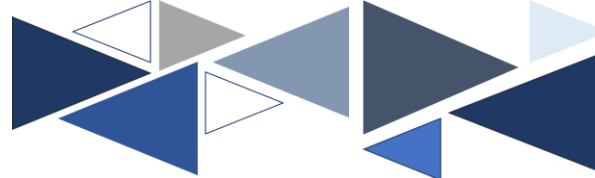
B. INTERVENSI SENSITIF

1. Cakupan Layanan Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) tertinggi di Kecamatan Kotawaringin Lama 4,67%. Indikator ini merupakan indikator tambahan dari daerah untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*.
2. Cakupan Layanan Calon pasangan usia subur (PUS) yg memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah telah memenuhi target layanan (100%).
3. Cakupan Layanan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah telah memenuhi target layanan (100%).
4. Cakupan Layanan Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting* telah memenuhi target layanan (100%) pada 4 (empat) kecamatan. Sedangkan Kecamatan Kumai telah mencapai 94,44% dan Kecamatan Arut Utara sebesar 45,45%.
5. Cakupan Layanan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat tertinggi di Kabupaten Kumai sebesar 2,27. Pemenuhan pemberian bantuan sesuai dengan sasaran intervensi yang ditetapkan oleh daerah.
6. Cakupan Layanan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai tertinggi di Kecamatan Kumai sebesar 2,34%. Indikator ini merupakan indikator tambahan dari daerah untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*. Pemenuhan pemberian bantuan sesuai dengan sasaran intervensi yang ditetapkan oleh daerah.
7. Cakupan Layanan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan tertinggi di Kecamatan Arut Selatan sebesar 2,09. Pemenuhan pemberian bantuan sesuai dengan sasaran intervensi yang ditetapkan oleh daerah.
8. Cakupan Layanan Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana tertinggi di Kecamatan Arut Selatan sebesar 17,28% dan Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar 14,42%. Indikator ini merupakan indikator tambahan dari daerah untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*.



9. Cakupan Layanan Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan tertinggi di Kecamatan Pangkalan Lada sebesar 24,24%. Kecamatan lainnya belum memenuhi target nasional yaitu 15,5%.
10. Cakupan Layanan Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) telah terpenuhi layanannya di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Kecamatan yang belum memenuhi target nasional (90%) adalah Kecamatan Arut Utara yaitu 82,20%.
11. Cakupan Layanan Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tertinggi di Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar 95,65%. Indikator ini merupakan indikator tambahan dari daerah untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*.
12. Cakupan Layanan Keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri tertinggi di Kecamatan Arut Selatan sebesar 55%. Indikator ini merupakan indikator tambahan dari daerah untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*.
13. Cakupan Layanan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan tertinggi di Kecamatan Arut Utara sebesar 93,18%. Sedangkan kecamatan lainnya belum memenuhi target nasional yaitu 70%.
14. Cakupan Layanan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan tertinggi di Kecamatan Pangkalan Lada sebesar 96,64% dan Kecamatan Pangkalan Banteng sebesar 95,82%. Sedangkan kecamatan lainnya belum memenuhi target nasional yaitu 90%.
15. Cakupan Layanan Keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi tertinggi di Kecamatan Pangkalan Lada sebesar 90,91%. Indikator ini merupakan indikator tambahan dari daerah untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*.
16. Cakupan Layanan Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak tertinggi di Kecamatan Arut Selatan sebesar 93,65%. Semua kecamatan belum memenuhi target nasional yaitu 100%.
17. Cakupan Layanan Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak telah terpenuhi layanannya (100%) di Kecamatan Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, dan Arut Utara. Kecamatan lainnya telah memenuhi target nasional sebesar 90%.
18. Cakupan Layanan Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan telah terpenuhi layanannya yaitu 100% meskipun indikator ini merupakan indikator tambahan dari daerah untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*.
19. Cakupan Layanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur tertinggi di Kecamatan Kumai sebesar 2,42. Pemenuhan pemberian bantuan sesuai dengan sasaran intervensi yang ditetapkan oleh daerah. Indikator ini merupakan indikator tambahan dari daerah untuk mendukung percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*.

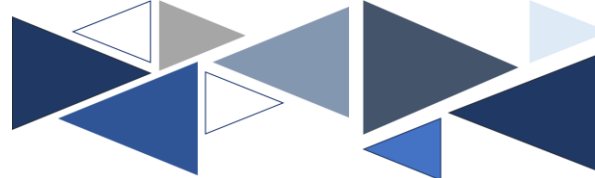
Meskipun beberapa capaian indikator cakupan layanan dan beberapa kecamatan sudah memenuhi target nasional atau bahkan melebihi target, Daerah tetap harus mempertahankan capaian indikator tersebut serta jika memungkinkan untuk dapat memenuhi hingga 100% layanan. Untuk lebih jelas, hasil analisa situasi disajikan pada tabel-tabel berikut ini.



Tabel 14 Hasil Analisa Situasi Intervensi Spesifik

KECAMATAN	1. Calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	2. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	3. Bumil Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	4. Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	5. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	6. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	7. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	8. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	9. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	10. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap
Kotawaringin Lama	64,35	100,00	70,59	86,44	64,39	100,00	35,29	51,36	70,59	92,52
Arut Selatan	52,20	100,00	85,00	86,63	66,61	100,00	50,00	70,48	100,00	92,56
Kumai	-	100,00	100,00	84,89	69,97	100,00	50,00	62,61	100,00	99,26
Pangkalan Banteng	-	100,00	100,00	72,87	62,51	100,00	47,06	71,85	100,00	98,55
Pangkalan Lada	-	100,00	100,00	85,25	78,31	100,00	81,82	81,59	100,00	90,58
Arut Utara	-	100,00	100,00	90,76	67,37	100,00	100,00	78,07	100,00	94,84
Rata-Rata Capaian Layanan	22,74	100,00	91,49	84,10	67,57	100,00	56,38	67,95	94,68	94,95
Target Nasional Tahun 2024	Indikator Tambahan dari Daerah	58	90	80	80	80	90	90	90	90
Rencana Target Kab. Kotawaringin Barat	Menaikkan Capaian Layanan	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 42%	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 1,49%	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 4,10%	menaikkan capaian layanan sebesar 12,43%	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 20%	menaikkan capaian layanan sebesar 33,62%	menaikkan capaian layanan sebesar 22,05%	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 4,68%	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 4,95%

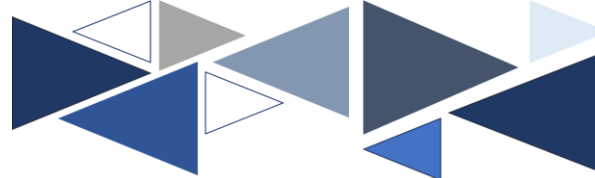
Sumber: Bappeda, 2023, diolah dan dianalisis



Tabel 15 Hasil Analisa Situasi Intervensi Sensitif

NO	NAMA_KECAMATAN	1. Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	2. Calon pasangan usia subur (PUS) yg memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	4. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	5. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	8. Persentase <i>Unmet Need</i> pelayanan keluarga berencana	9. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan
1	Kotawaringin Lama	4,67	100,00	100,00	100,00	0,16	0,17	0,35	14,42	2,94
2	Arut Selatan	0,45	100,00	100,00	100,00	1,22	1,18	2,09	17,28	9,35
3	Kumai	0,89	100,00	100,00	94,44	2,27	2,34	1,78	4,95	6,94
4	Pangkalan Banteng	0,59	100,00	100,00	100,00	0,64	0,75	0,57	11,02	7,07
5	Pangkalan Lada	0,55	100,00	100,00	100,00	1,38	1,00	0,79	10,46	24,24
6	Arut Utara	-	100,00	100,00	45,45	0,22	0,21	0,17	8,99	-
	Rata-Rata Capaian Layanan	1,28	100,00	100,00	92,55	1,03	1,01	1,06	11,50	7,97
	Target Nasional Tahun 2024	Indikator Tambahan dari Daerah	90	Indikator Tambahan dari Daerah	Indikator Tambahan dari Daerah	10 (juta)	Indikator Tambahan dari Daerah	112,9 (juta)	Indikator Tambahan dari Daerah	15,5
	Rencana Target Kab. Kotawaringin Barat	Menaikkan Capaian Layanan	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 10%	Menaikkan Capaian Layanan	Menaikkan Capaian Layanan	Pemenuhan Pemberian Bantuan Sesuai dengan Sasaran Intervensi	Menaikkan Capaian Layanan	Pemenuhan Pemberian Bantuan Sesuai dengan Sasaran Intervensi	Menaikkan Capaian Layanan	menaikkan capaian layanan sebesar 7,53%

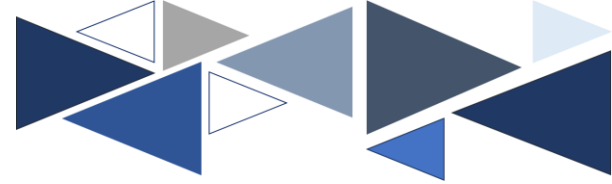
Sumber: Bappeda, 2023, diolah dan dianalisis



Lanjutan...

KECAMATAN	10. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	11. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	12. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	13. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	14. Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	15. Keluarga berisiko stunting yg mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	16. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	17. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	18. Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan	19. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur
Kotawaringin Lama	93,69	78,67	35,29	32,89	52,24	58,82	90,71	96,29	100,00	0,19
Arut Selatan	91,33	69,91	55,00	54,36	48,00	55,00	93,65	93,15	100,00	1,20
Kumai	95,25	62,41	50,00	44,99	73,61	55,56	91,72	97,67	100,00	2,42
Pangkalan Banteng	100,00	95,65	23,53	43,39	95,82	64,71	82,35	100,00	100,00	0,77
Pangkalan Lada	100,00	89,40	27,27	53,08	96,64	90,91	91,45	100,00	100,00	1,27
Arut Utara	82,20	36,76	9,09	93,18	14,64	63,64	86,09	100,00	100,00	0,18
Rata-Rata Capaian Layanan	94,02	73,11	36,17	51,09	64,11	62,77	89,56	97,43	100,00	1,06
Target Nasional Tahun 2024	90	Indikator Tambahan dari Daerah	Indikator Tambahan dari Daerah	70	90	Indikator Tambahan dari Daerah	100	90	Indikator Tambahan dari Daerah	15,6 (juta)
Rencana Target Kab. Kotawaringin Barat	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 4,02%	Menaikkan Capaian Layanan	Menaikkan Capaian Layanan	menaikkan capaian layanan sebesar 18,91%	menaikkan capaian layanan sebesar 25,89%	Menaikkan Capaian Layanan	menaikkan capaian layanan sebesar 10,44%	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 7,43%	Menaikkan Capaian Layanan	Pemenuhan Pemberian Bantuan Sesuai dengan Sasaran Intervensi

Sumber: Bappeda, 2023, diolah dan dianalisis



5.3 Analisa Situasi Data P3KE Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisa data P3KE, diketahui bahwa KK miskin terbanyak adalah Kecamatan Kumai yaitu 2.726 KK dan Kecamatan Arut Selatan yaitu 2.573 KK. Jumlah keseluruhan KK miskin yang terdata dalam P3KE mencapai 9.414 KK. Berikut adalah jumlah KK miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.

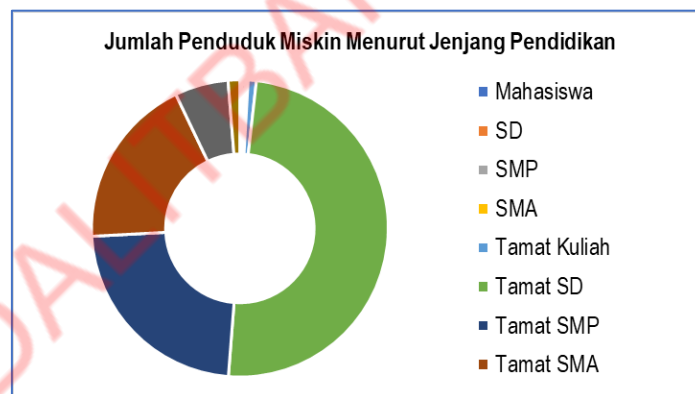
Tabel 16 Jumlah KK Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah KK Miskin
1	Arut Selatan	2573
2	Arut Utara	676
3	Kotawaringin Lama	765
4	Kumai	2726
5	Pangkalan Banteng	1522
6	Pangkalan Lada	1152
Jumlah		9414

Sumber: P3KE, 2022, diolah

Selain itu, dalam data P3KE terdapat beberapa hal yang menjadi fokus dalam penanganan *stunting* yang meliputi:

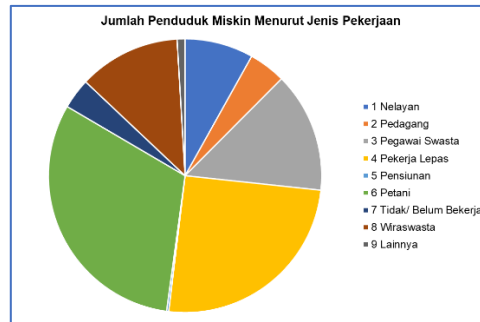
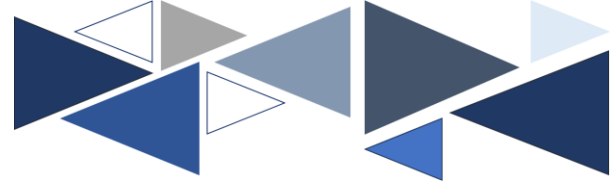
1. Jumlah Masyarakat Penduduk Miskin Ekstrem Berpendidikan Rendah Cukup Tinggi, dimana KK yang hanya menamatkan SD merupakan yang terbanyak yaitu 4.656 KK. Selain itu, yang hanya menamatkan SMP sebanyak 2.112 KK dan yang menamatkan SMA sebanyak 1.809 KK. Sedangkan untuk KK yang menamatkan Perguruan Tinggi hanya sebanyak 84 KK.



Gambar 15 Penduduk Miskin Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Sumber: P3KE, 2022, diolah

2. Minimnya Akses Pekerjaan serta Sulitnya Keberlanjutan Ekonomi Bagi Penduduk Miskin. Hal tersebut dapat diketahui dari pekerjaan yang mayoritas adalah petani (2.943 KK), pekerja lepas (2.374 KK), dan pegawai swasta (1.338 KK).



Gambar 16 Penduduk Miskin Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

Sumber: P3KE, 2022, diolah

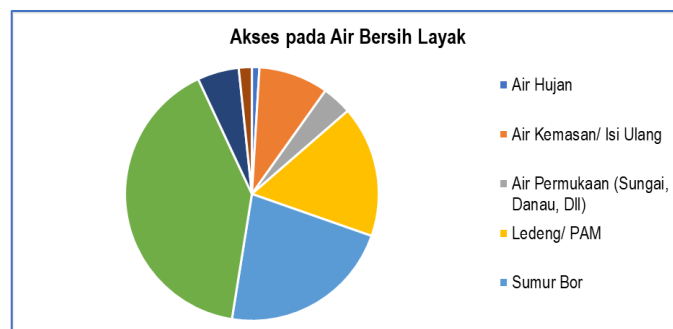
- Akses Yang Minim Pada Sanitasi Layak. Sebanyak 7.957 KK memiliki fasilitas BAB dengan *septic tank* dan 531 KK dengan fasilitas BAB tanpa *septic tank*. Sebanyak 819 KK yang tidak memiliki fasilitas BAB atau menggunakan jamban umum/ bersama.



Gambar 17 Akses Penduduk Miskin pada Sanitasi Layak

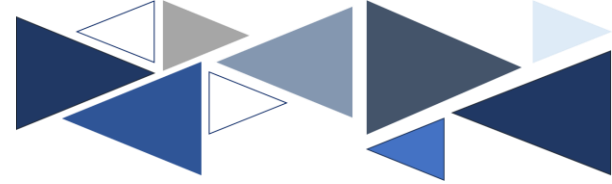
Sumber: P3KE, 2022, diolah

- Akses Yang Minim Pada Sumber Air Minum Layak. Sumber air bersih/ air minum yang digunakan oleh penduduk miskin meliputi sumber dari air hujan (89 KK), Air kemasan/ Isi Ulang (838 KK), Air Permukaan seperti Sungai, Danau, DII (356 KK), Ledeng/ PAM (1.576 KK), Sumur Bor (2.086 KK), Sumur Terlindung (3.814 KK), Sumur Tak Terlindung (498 KK), dan Lainnya (157 KK). Mayoritas penduduk miskin menggunakan sumber air bersih yang kualitasnya tidak terjamin karena kondisi wilayah yang memang sulit dijangkau layanan PDAM. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga menggunakan sumber air bersih yang dapat dijangkau.



Gambar 18 Akses Penduduk Miskin pada Air Bersih/ Minum Layak

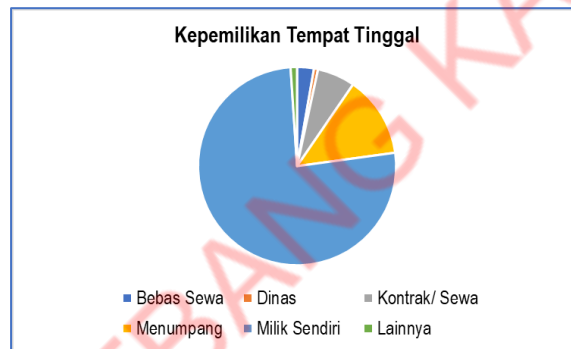
Sumber: P3KE, 2022, diolah



5. Mayoritas penduduk miskin Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni, yang dapat dilihat melalui Kepemilikan Tempat Tinggal, Jenis Dinding, Jenis Atap, Jenis Lantai, dan Sumber Penerangan. Mayoritas penduduk miskin di Kotawaringin Barat memiliki rumah sendiri (7.165 KK atau 76,11%). Namun, masih banyak penduduk yang tidak memiliki rumah sendiri seperti rumah menumpang (1.249 KK atau 13,27%), kontrak/ sewa (580 KK atau 6,16%), bebas sewa (258 KK atau 2,74%), rumah dinas (63 KK atau 0,67%) dan lainnya (99 KK atau 1,05%).

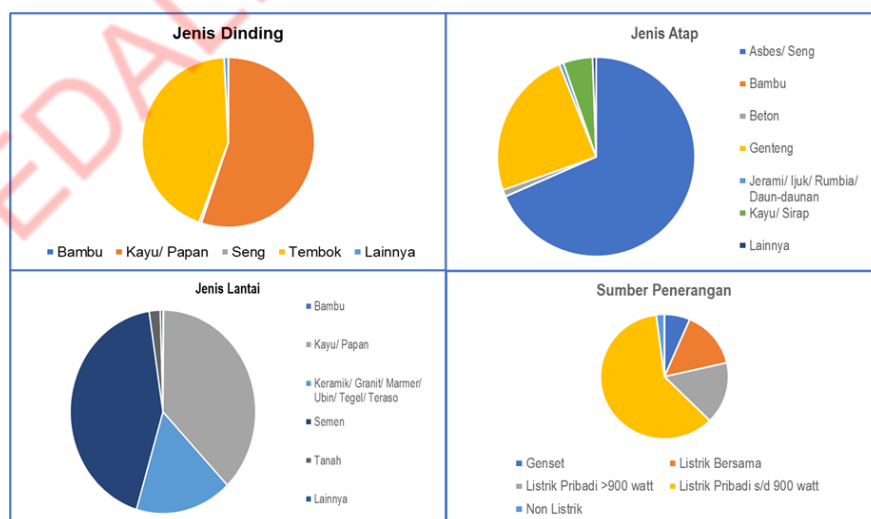
Diketahui juga bahwa rumah yang ditinggali tersebut masih banyak dalam kondisi tidak layak huni seperti jenis dinding yang masih terbuat dari bambu (3 KK), kayu/ papan (5.182 KK atau 55,05%), dan seng (41 KK atau 0,44%); jenis atap yang masih terbuat dari asbes/ seng (6.446 KK atau 68,47%), bambu (4 KK atau 0,04%), jerami/ ijuk/ rumbia/ daun-daunan (65 KK atau 0,69%), kayu/ sirap (453 KK atau 4,81%), serta jenis lantai yang masih terbuat dari bambu (12 KK atau 0,13%), kayu/ papan (3.546 KK atau 37,67%), semen (4.047 KK atau 42,99%) dan tanah (182 KK atau 1,93%).

Selain itu, sumber penerangan yang digunakan warga miskin mayoritas adalah listrik pribadi sampai dengan 900 watt. Namun masih ada warga yang tidak teraliri listrik sebanyak 195 KK atau 2,07% serta penggunaan listrik bersama sebanyak 1.408 KK atau 14,96%.



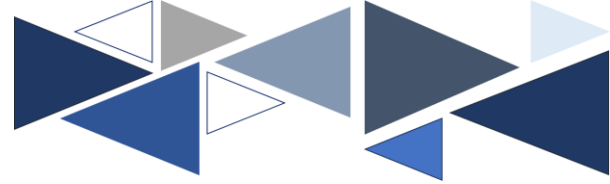
Gambar 19 Kepemilikan Lahan Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: P3KE, 2022, diolah



Gambar 20 Jenis Dinding, Atap, Lantai, dan Sumber Penerangan pada Tempat Tinggal Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: P3KE, 2022, diolah



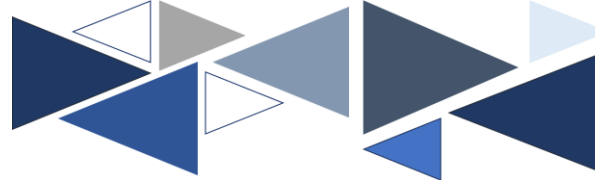
6. Resiko *Stunting* Pada Keluarga Miskin Masih Tinggi. Hal tersebut dapat diketahui melalui kondisi-kondisi di atas. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan dalam sebuah keluarga dapat memicu terjadinya *stunting*. Kondisi tersebut dapat menjadi semakin beresiko tinggi jika sebuah keluarga tidak memiliki pendapatan yang memadai sehingga kebutuhan sehari-hari jarang atau bahkan tidak terpenuhi. Selain itu, minimnya akses pada air bersih/ minum dan sanitasi layak juga menjadi salah satu pemicu lingkungan yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan tingginya resiko *stunting* pada suatu keluarga. Berdasarkan data, resiko *stunting* pada penduduk miskin mencapai 7.869 KK atau 83,59%. Kecamatan dengan resiko *stunting* tertinggi adalah Kecamatan Kumai sebanyak 2.302 KK dan Kecamatan Arut Selatan sebanyak 2.104 KK beresiko *stunting*.



Gambar 21 Jumlah KK Beresiko Stunting pada Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber: P3KE, 2022, diolah

Untuk lebih detail, data P3KE disajikan pada tabel-tabel berikut ini secara berurutan.



Tabel 17 Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Tingkat Pendidikan

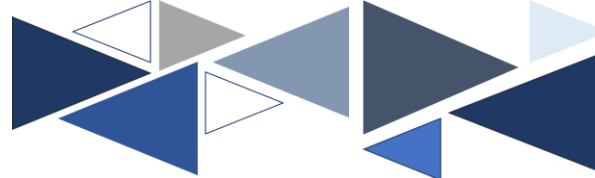
Kecamatan	Pendidikan (KK)										Jumlah
	Mahasiswa	Siswa SD	Siswa SMP	Siswa SMA	Tamat Perguruan Tinggi	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tidak Tamat SD	Tidak/ Belum Sekolah	
Arut Selatan	1	7	12	9	31	1116	649	615	106	27	2573
Arut Utara	0	0	0	0	10	344	134	93	89	6	676
Kotawaringin Lama	0	1	1	2	7	440	156	92	50	16	765
Kumai	0	10	10	5	18	1441	543	416	229	54	2726
Pangkalan Banteng	0	5	6	3	12	759	318	363	46	10	1522
Pangkalan Lada	1	2	6	3	6	556	312	230	29	7	1152
Jumlah	2	25	35	22	84	4656	2112	1809	549	120	9414

Sumber: P3KE Tahun 2022, diolah

Tabel 18 Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Pekerjaan

Kecamatan	Pekerjaan (KK)									Jumlah
	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Pekerja Lepas	Pensiunan	Petani	Tidak/ Belum Bekerja	Wiraswasta	Lainnya	
Arut Selatan	107	163	431	755	11	621	105	352	28	2573
Arut Utara	0	8	93	36	2	437	15	66	19	676
Kotawaringin Lama	22	42	105	161	2	288	44	93	8	765
Kumai	615	68	275	816	1	428	116	397	10	2726
Pangkalan Banteng	17	91	251	198	6	800	26	124	9	1522
Pangkalan Lada	0	39	183	408	2	369	33	101	17	1152
Jumlah	761	411	1338	2374	24	2943	339	1133	91	9414

Sumber: P3KE Tahun 2022, diolah



Tabel 19 Akses Penduduk Miskin Terhadap Sanitasi Layak

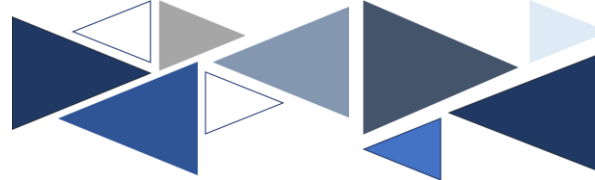
Kecamatan	Memiliki Fasilitas BAB (KK)				Jumlah
	Ya, dengan Septic Tank	Ya, tanpa Septic Tank	Tidak, Jamban Umum/ Bersama	Lainnya	
Arut Selatan	2233	87	238	15	2573
Arut Utara	410	85	173	8	676
Kotawaringin Lama	689	22	47	7	765
Kumai	2332	80	282	32	2726
Pangkalan Banteng	1366	100	45	11	1522
Pangkalan Lada	927	157	34	34	1152
Jumlah	7957	531	819	107	9414

Sumber: P3KE Tahun 2022, diolah

Tabel 20 Akses Penduduk Miskin Terhadap Air Minum/ Bersih Layak

Kecamatan	Sumber Air Minum (KK)								Jumlah
	Air Hujan	Air Kemasan/ Isi Ulang	Ledeng/ PAM	Sumur Bor	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Air Permukaan (Sungai, Danau, dll)	Lainnya	
Arut Selatan	2	357	677	861	576	28	0	72	2573
Arut Utara	0	6	126	134	153	12	184	61	676
Kotawaringin Lama	0	36	37	75	566	35	16		765
Kumai	85	271	463	962	817	42	85	1	2726
Pangkalan Banteng	2	36	177	20	999	244	29	15	1522
Pangkalan Lada	0	169	96	34	703	137	5	8	1152
Jumlah	89	875	1576	2086	3814	498	319	157	9414

Sumber: P3KE Tahun 2022, diolah



Tabel 21 Kepemilikan Tempat Tinggal Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Kepemilikan (KK)						Jumlah
	Milik Sendiri	Bebas Sewa	Dinas	Kontrak/ Sewa	Menumpang	Lainnya	
Arut Selatan	1831	58	11	338	316	19	2573
Arut Utara	528	10	8	5	95	30	676
Kotawaringin Lama	669	15	1	17	63	0	765
Kumai	2160	111	2	97	318	38	2726
Pangkalan Banteng	1132	32	27	64	261	6	1522
Pangkalan Lada	845	32	14	59	196	6	1152
Jumlah	7165	258	63	580	1249	99	9414

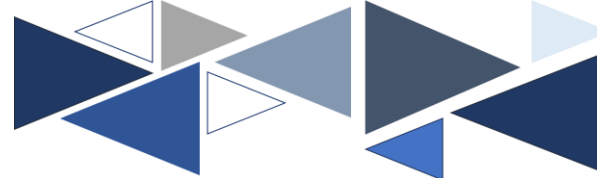
Sumber: P3KE Tahun 2022, diolah

Tabel 22 Kelayakan Tempat Tinggal Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Jenis Atap (KK)						Jumlah
	Asbes/ Seng	Beton	Genteng	Jerami/ Ijuk/ Rumbia/ Daun-daunan	Kayu/ Sirap	Lainnya	
Arut Selatan	1796	40	514	2	206	15	2573
Arut Utara	549	1	14	0	110	2	676
Kotawaringin Lama	708	1	22	0	31	3	765
Kumai	2026	40	508	56	93	3	2726
Pangkalan Banteng	1033	6	472	6	2	3	1522
Pangkalan Lada	334	14	760	1	11	32	1152
Jumlah	6446	102	2290	65	453	58	9414

Lanjutan...

Kecamatan	Jenis Dinding (KK)					Jumlah
	Bambu	Kayu/ Papan	Seng	Tembok	Lainnya	
Arut Selatan	1	1401	9	1157	5	2573
Arut Utara	0	637	9	28	2	676
Kotawaringin Lama	0	538	1	219	7	765
Kumai	0	1512	5	1185	24	2726
Pangkalan Banteng	0	699	2	818	3	1522
Pangkalan Lada	2	395	15	709	31	1152
Jumlah	3	5182	41	4116	72	9414



Lanjutan...

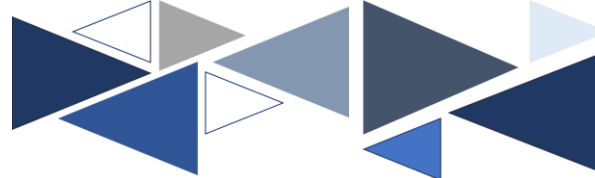
Kecamatan	Jenis Lantai (KK)						Jumlah
	Bambu	Kayu/ Papan	Keramik/ Marmer/ Ubin	Semen	Tanah	Lainnya	
Arut Selatan	1	1052	538	948	29	5	2573
Arut Utara	0	621	25	24	4	2	676
Kotawaringin Lama	1	395	56	301	11	1	765
Kumai	3	1255	514	926	24	4	2726
Pangkalan Banteng	0	167	258	1030	67	0	1522
Pangkalan Lada	7	56	193	818	47	31	1152
Jumlah	12	3546	1584	4047	182	43	9414

Sumber: P3KE Tahun 2022, diolah

Tabel 23 Sumber Penerangan yang Digunakan Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Sumber Penerangan (KK)					Jumlah
	Genset/ Solar cell	Listrik Bersama	Listrik Pribadi > 900 Watt	Listrik Pribadi s/d 900 Watt	Non Listrik	
Arut Selatan	86	330	576	1530	51	2573
Arut Utara	371	86	3	127	88	675
Kotawaringin Lama	1	46	186	523	9	765
Kumai	94	435	398	1772	28	2727
Pangkalan Banteng	48	263	190	1007	14	1522
Pangkalan Lada	9	249	159	731	4	1152
Jumlah	609	1409	1512	5690	194	9414

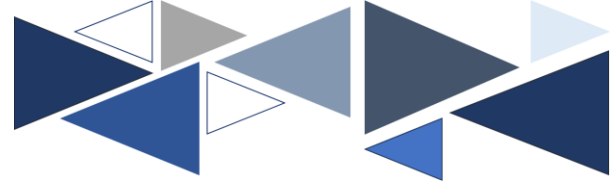
Sumber: P3KE Tahun 2022, diolah



Tabel 24 Keluarga Beresiko *Stunting* pada Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Resiko Stunting (KK)			Jumlah
	0	1	2	
Arut Selatan	469	1537	567	2573
Arut Utara	112	456	108	676
Kotawaringin Lama	181	326	258	765
Kumai	424	1649	653	2726
Pangkalan Banteng	224	935	363	1522
Pangkalan Lada	135	703	314	1152
Jumlah	1545	5606	2263	9414

Sumber: P3KE Tahun 2022, diolah



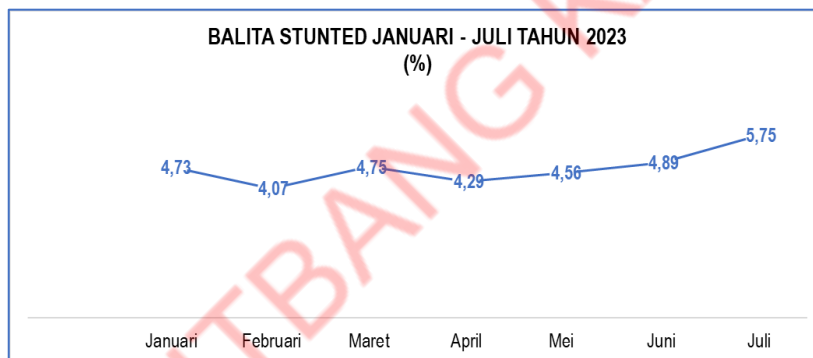
5.4 Balita *Stunted*

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023, diketahui bahwa terdapat balita *stunted* yang jumlahnya fluktuatif dari bulan Januari – Juli tahun 2023 ini. Berikut adalah data balita *stunted* di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Tabel 25 Balita *Stunted* di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

Bulan	Jumlah Balita Ukur	Jumlah Balita <i>Stunted</i>	%
Januari	10168	481	4,73
Februari	14780	601	4,07
Maret	12633	600	4,75
April	11111	477	4,29
Mei	10985	501	4,56
Juni	10882	532	4,89
Juli	6382	367	5,75

Sumber: Dinas P3AP2KB, 2023, diolah

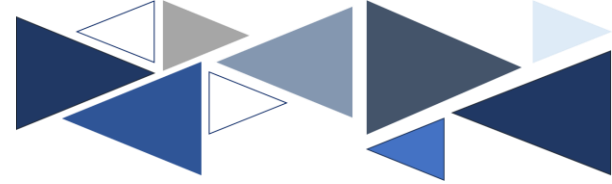


Gambar 22 Perkembangan Balita *Stunted* di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

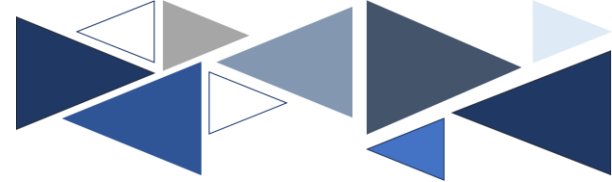
Sumber: Dinas P3AP2KB, 2023, diolah

Tabel 26 Jumlah Balita Ukur dan Balita *Stunted* Berdasarkan Puskesmas dan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Bulan Juli Tahun 2023

No	PUSKESMAS	Desa/ Kelurahan	Bulan Juli		
			Jumlah Balita Ukur	Jumlah Balita <i>Stunted</i>	%
1	ARUT SELATAN	RAJA	262	3	1,15
		RAJA SEBERANG	61	7	11,48
2	MENDAWAI	MENDAWAI	552	5	0,91
		MENDAWAI SEBERANG	122	1	0,82
3	MADUREJO	PASIR PANJANG	0	0	0
		SIDOREJO	0	0	0
		MADUREJO	457	0	-
	NATAI PELINGKAU	BARU	74	1	1,35
		NATAI RAYA	74	16	21,62
		MEDANGSARI	5	0	-
		NATAI BARU	1	0	-
5	KUMPAI BATU ATAS	TANJUNG PUTRI	22	6	27,27
		KUMPAI BATU BAWAH	89	1	1,12
		KUMPAI BATU ATAS	79	6	7,59



No	PUSKESMAS	Desa/ Kelurahan	Bulan Juli		
			Jumlah Balita Ukur	Jumlah Balita Stunted	%
		TANJUNG TERANTANG	58	9	15,52
6	RUNTU	RANGDA	35	9	25,71
		KENAMBUI	22	4	18,18
		RUNTU	182	15	8,24
		UMPANG	30	5	16,67
		SULUNG	25	6	24,00
7	KUMAI	SUNGAI KAPITAN	80	25	31,25
		KUMAI HILIR	86	5	5,81
		BATU BELAMAN	60	3	5,00
		SUNGAI TENDANG	59	5	8,47
		CANDI	42	0	-
		KUMAI HULU	75	2	2,67
		SUNGAI BEDAUN	18	1	5,56
		SUNGAI SEKONYER	39	2	5,13
8	TELUK BOGAM	KUBU	71	0	-
		TELUK PULAI	26	3	11,54
		SUNGAI BAKAU	87	7	8,05
		TELUK BOGAM	56	6	10,71
		KERAYA	20	1	5,00
		SEBUAI	34	4	11,76
		SABUAI TIMUR	17	2	11,76
9	KARANG MULYA	SUNGAI CABANG	58	8	13,79
		KARANG MULYA	1	0	-
		SIMPANG BERAMBAI	108	3	2,78
		SUNGAI PAKIT	125	13	10,40
		BERAMBAI MAKMUR	40	4	10,00
		KARANG SARI	50	3	6,00
		MULYA JADI	61	3	4,92
		SUNGAI PULAU	39	1	2,56
		AMIN JAYA	161	16	9,94
10	SEMANGGANG	NATAI KERBAU	42	6	14,29
		PANGKALAN BANTENG	0	0	0
		MARGA MULYA	37	4	10,81
		ARGA MULYA	0	0	0
		KEBUN AGUNG	78	17	21,79
		SIDOMULYA	0	0	0
		SUNGAI HIJAU	6	2	33,33
		SUNGAI BENGKUANG	0	0	0
11	PANGKALAN LADA	SUNGAI KUNING	47	6	12,77
		LADA MANDALA JAYA	57	1	1,75
		PANGKALAN TIGA	121	6	4,96
12	PANDU SANJAYA	PANGKALAN DEWA	69	3	4,35
		MAKARTI JAYA	0	0	#DIV/0!
		PANDU SANJAYA	58	5	8,62
		KADIPI ATAS	96	13	13,54
13	ARUT UTARA	SUNGAI MELAWEN	85	16	18,82
		NANGA MUA	17	0	-
		KERABU	22	0	-
		PANGKUT	248	3	1,21
		SUKARAMI	20	0	-
14	SAMBI	GANDIS	29	0	-
		PENYOMBAAN	0	0	0
		SAMBI	0	0	0
		PANDAU	0	0	0



No	PUSKESMAS	Desa/ Kelurahan	Bulan Juli		
			Jumlah Balita Ukur	Jumlah Balita Stunted	%
		RIAM	0	0	0
		PENAHAN	0	0	0
		SUNGAI DAU	0	0	0
15	SUNGAI RANGIT	BUMI HARJO	142	2	1,41
		PANGKALAN SATU	115	14	12,17
		SUMBER AGUNG	159	17	10,69
		PANGKALAN DURIN	146	1	0,68
		PURBASARI	225	5	2,22
		SUNGAI RANGIT JAYA	104	15	14,42
		JUMLAH		6.382	367
16	RIAM DURIAN	SUMBER MUKTI	32	0	-
		BABUAL BABOTI	41	3	7,32
		RIAM DURIAN	95	0	-
		DAWAK	88	1	1,14
		SUKAJAYA	51	0	-
		KINJIL	90	2	2,22
		SAKABULIN	61	1	1,64
		TEMPAYUNG	55	0	-
17	KOTAWARINGIN LAMA	LALANG	5	0	-
		SAGU SUKAMULYA	41	1	2,44
		KOTAWARINGIN HILIR	61	0	-
		KOTAWARINGIN HULU	33	0	-
		RUNGUN	32	0	-
18	IPUH BANGUN JAYA	KONDANG	26	1	3,85
		SUKAMAKMUR	64	1	1,56
		IPUH BANGUN JAYA	65	5	7,69
		PALIH BARU	56	5	8,93

Sumber: Dinas P3AP2KB, 2023, diolah

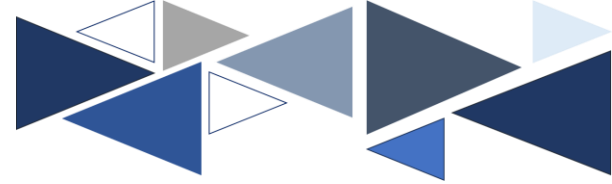
Dapat diketahui bahwa jumlah balita *stunted* di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Januari – Juli mengalami fluktuasi dimana jumlah balita *stunted* sempat mengalami penurunan pada bulan Februari dan April, namun mengalami kenaikan pada Mei – Juli. Sampai pada bulan Juli Tahun 2023, jumlah Balita *Stunted* tertinggi berada di Kelurahan Mendawai sebanyak 552 balita *stunted* dan Kelurahan Madurejo sebanyak 457 balita *stunted*.

5.5 Lokus *Stunting*

Lokus *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 meliputi 17 (tujuh belas) Desa/ Kelurahan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kasus yang ditemukan mencapai 484 kasus dengan rata-rata prevalensi mencapai 32,17%. Berikut adalah lokus *stunting* Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Tabel 27 Lokus *Stunting* Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kasus	Prevalensi
1	Arut Selatan	Tanjung Putri	10	33,33
2	Arut Selatan	Kumpai Batu Bawah	20	30,3
3	Arut Selatan	Kumpai Batu Atas	61	40,94
4	Arut Selatan	Rangda	25	40,32
5	Arut Selatan	Kenambui	20	29,85
6	Arut Selatan	Runtu	106	17,88
7	Kumai	Teluk Pulai	6	28,57
8	Pangkalan Lada	Pangkalan Tiga	60	23,9
9	Pangkalan Lada	Kadipi Atas	17	32,08



No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kasus	Prevalensi
10	Pangkalan Banteng	Arga Mulya	18	32,73
11	Pangkalan Banteng	Kebun Agung	14	28,57
12	Pangkalan Banteng	Sungai Hijau	28	32,18
13	Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	19	28,79
14	Arut Utara	Pandau	6	60
15	Arut Utara	Riam	6	37,5
16	Arut Utara	Gandis	6	31,58
17	Arut Utara	Pangkut	62	18,45
Jumlah			484	32,17

Sumber: Bappeda, 2023

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kasus terbanyak adalah **Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan**. Prevalensi *Stunting* tertinggi adalah Kumpai Batu Atas (40,94%) dan Kumpai Batu Bawah (40,32%).

Sedangkan pada tahun 2024, lokus *stunting* telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/23/BAPP-IV/2020 Tentang Desa/ Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting*. Berdasarkan SK tersebut, lokus *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2024 meliputi 10 (sepuluh) Desa/ Kelurahan yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Kasus yang ditemukan mencapai 174 kasus dengan rata-rata prevalensi mencapai 28,38%. Berikut adalah lokus *stunting* Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Tabel 28 Lokus *Stunting* Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Kasus	Prevalensi
1	Arut Selatan	Tanjung Terantang	12	19,67
2	Arut Selatan	Rangda	17	22,08
3	Kumai	Sabuai Timur	6	23,08
4	Pangkalan Banteng	Sungai Hijau	31	23,13
5	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	36	11,84
6	Arut Utara	Penyombaan	10	37,04
7	Arut Utara	Pandau	20	48,78
8	Arut Utara	Riam	13	31,71
9	Arut Utara	Panahan	14	28
10	Arut Utara	Sungai Dau	15	38,46
Jumlah			174	28,38

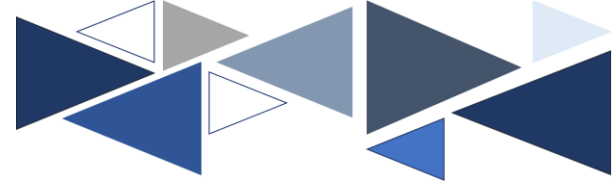
Sumber: Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/23/BAPP-IV/2020 Tentang Desa/ Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting*

Dari SK tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kasus terbanyak adalah jumlah kasus terbanyak adalah Desa Karang Mulya dan Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng dengan masing-masing 36 dan 31 kasus. Rata-rata prevalensi *stunting* di lokus *stunting* pada Tahun 2024 diharapkan mencapai 28,38%.

Berdasarkan hasil analisa, berikut adalah anggaran untuk penanganan *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Tabel 29 Anggaran untuk Penanganan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No	Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran	Proporsi dlm Total Anggaran	OPD Pelaksana
1	APBN	544.980.850,00	1,20%	Kementerian, Dinas Kesehatan
2	DAK Non Fisik	1.698.225.000,00	3,74%	BKKBN/ Dinas P3AP2KB, Dinas Kesehatan



No	Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran	Proporsi dlm Total Anggaran	OPD Pelaksana
3	DAK Fisik	10.762.000.000,00	23,71%	Dinas PUPR
4	APBN-APBD	665.000.000,00	1,46%	Dinas PUPR
5	APBD	31.059.742.422,00	68,42%	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Bapelitbangda, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, BKKBN/ Dinas P3AP2KB
6	APBD - DAK Non Fisik	665.707.200,00	1,47%	BKKBN/ Dinas P3AP2KB, Dinas Ketahanan Pangan
Total Anggaran <i>Stunting</i>		45.395.655.472,00	100%	

Sumber: Tim Penyusun, 2023

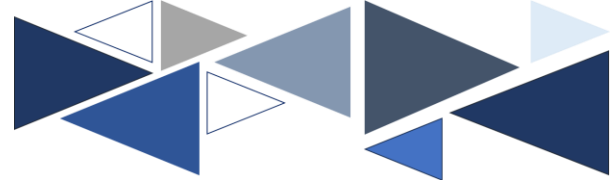
Dapat diketahui bahwa total APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 mencapai Rp. 1.563.073.468.525,00. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk penanganan *stunting* mencapai Rp. 31.059.742.422,00 atau sekitar 1,98%. Berdasarkan tabel, penganggaran penanganan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 berjumlah Rp. 45.395.655.472,00 yang terdiri dari APBN, DAK Non Fisik, DAK Fisik, APBN-APBD, APBD, APBD – DAK Non Fisik. Proporsi anggaran APBD dalam penanganan *stunting* adalah sebesar 68,42%.

6. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pendataan dan hasil analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah rekomendasi untuk intervensi yang dapat dilakukan dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 yang meliputi 10 (sepuluh) lokus *stunting* yang tersebar di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Rekomendasi yang disusun meliputi arahan intervensi spesifik dan sensitif.

Tabel 30 Rekomendasi Arahan Intervensi Spesifik pada Lokus *Stunting* Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat

SASARAN INTERVENSI	ARAHAN INTERVENSI	LOKUS <i>STUNTING</i> 2024
1. Calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Menaikkan Capaian Layanan	Tanjung Terantang, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
2. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 42%. Mempertahankan capaian.	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
3. Bumil Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 1,49%. Mempertahankan dan menaikkan capaian.	
4. Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 4,10%. Mempertahankan dan menaikkan capaian.	
5. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Menaikkan capaian layanan sebesar 12,43%	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
6. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 20%.	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya,

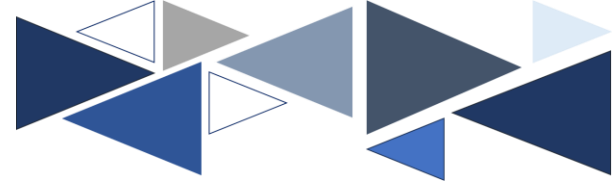


SASARAN INTERVENSI	ARAHAN INTERVENSI	LOKUS STUNTING 2024
Susu Ibu (MP-ASI)	Mempertahankan capaian.	Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
7. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Menaikkan capaian layanan sebesar 33,62%	Tanjung Terantang, Rangda, Sungai Hijau, Karang Mulya
8. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Menaikkan capaian layanan sebesar 22,05%	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Riam
9. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 4,68%. Mempertahankan dan menaikkan capaian.	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
10. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 4,95%. Mempertahankan dan menaikkan capaian.	

Sumber: Tim Penyusun, 2023

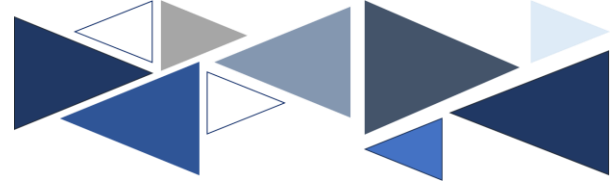
Tabel 31 Rekomendasi Arahkan Intervensi Spesifik pada Lokus Stunting Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat

SASARAN INTERVENSI	ARAHAN INTERVENSI	LOKUS STUNTING
1. Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Menaikkan Capaian Layanan	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
2. Calon pasangan usia subur (PUS) yg memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 10%. Mempertahankan capaian.	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Mempertahankan Capaian Layanan	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
4. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	Menaikkan Capaian Layanan	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
5. Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	Pemenuhan Pemberian Bantuan Sesuai dengan Sasaran Intervensi	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	Menaikkan Capaian Layanan	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Pemenuhan Pemberian Bantuan Sesuai dengan Sasaran Intervensi	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau



SASARAN INTERVENSI	ARAHAN INTERVENSI	LOKUS STUNTING
8. Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	Menaikkan Capaian Layanan	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
9. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	Menaikkan capaian layanan sebesar 7,53%	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
10. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 4,02%. Mempertahankan dan menaikkan capaian.	Pandau, Sungai Dau
11. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Menaikkan Capaian Layanan	Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
12. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Menaikkan Capaian Layanan	Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Penyombaan, Pandau, Riam, Sungai Dau
13. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Menaikkan capaian layanan sebesar 18,91%	Tanjung Terantang, Rangda, Sungai Hijau, Karang Mulya
14. Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Menaikkan capaian layanan sebesar 25,89%	Rangda, Sungai Hijau, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
15. Keluarga berisiko stunting yg mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Menaikkan Capaian Layanan	Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau
16. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Menaikkan capaian layanan sebesar 10,44%	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Riam, Sungai Dau
17. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Sudah melebihi target capaian layanan sebesar 7,43%. Mempertahankan dan menaikkan capaian.	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
18. Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul Kesehatan	Mempertahankan Capaian Layanan	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau
19. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	Pemenuhan Pemberian Bantuan Sesuai dengan Sasaran Intervensi	Tanjung Terantang, Rangda, Sabuai Timur, Sungai Hijau, Karang Mulya, Penyombaan, Pandau, Riam, Panahan, Sungai Dau

Sumber: Tim Penyusun, 2023



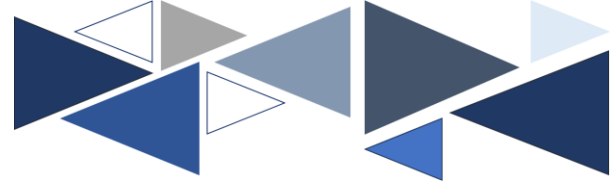
7. LAMPIRAN

7.1. FGD Laporan Pendahuluan

Nama Rapat : FGD Laporan Pendahuluan Kajian Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat
Hari dan Tanggal : Kamis, 30 Maret 2023
Waktu : 09.15 – selesai
Tempat : Aula Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 23 FGD Laporan Pendahuluan



7.2. FGD Laporan Antara (Fakta dan Analisa)

Nama Rapat : FGD Laporan Antara Kajian Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat
Hari dan Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Waktu : 14.00 – selesai
Tempat : Aula Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 24 FGD Laporan Antara



7.3. FGD Laporan Akhir

Nama Rapat : FGD Laporan Akhir Kajian Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kotawaringin Barat
Hari dan Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023
Waktu : 14.00 – selesai
Tempat : Aula Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 25 FGD Laporan Akhir